



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo Tahun 2021.





**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
INSPEKTORAT DAERAH**

JI Jend. Sudirman NO.79 Kota Gorontalo Telp.(0435) 831061 Fax.(0435) 831063

**PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah melakukan reviu atas Draft Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 22 Maret 2022

INSPEKTUR

SUKRIL GOBEL, SE., M.Si, CGCAE
NIP. 19680422 199703 1 003

Kata Pengantar



**Mewujudkan
Masyarakat
Gorontalo yang
Maju, Unggul dan
Sejahtera**

Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dapat kami tunaikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2021. Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, performance Pemerintah Provinsi Gorontalo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja yang masuk dalam program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur yang lebih merata, ekonomi yang lebih meningkat, pemerintahan yang lebih melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia dan lingkungan yang lebih lestari, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Gorontalo.

Diharapkan, Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 ini, dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo guna keberlanjutan pembangunan daerah dimasa yang akan datang dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Gorontalo, Maret 2022

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Gorontalo	7
1.3.1. Kondisi Geografis Daerah	7
1.3.2. Jumlah Penduduk	9
1.3.3. Kondisi Ekonomi	10
1.4. Isu Strategis	12
1.5. Sumber Daya Aparatur	15
1.6. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	16
1.7. Sistematika Pelaporan	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	26
2.1. Rencana Strategis	26
2.1.1. VISI	27
2.1.2. MISI	28
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	29
2.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah	31
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	34

2.3. Rencana Kinerja Pembangunan Daerah	38
2.4. Perjanjian Kinerja	49
2.5. Pengukuran Kinerja	51
2.6. Instrumen Pendukung	51
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	61
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	67
3.2. Capaian Indikator Kinerja Pendukung IKU Tahun 2021	116
3.3. Realisasi Anggaran	177
3.3.1. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	177
3.3.2. Analisis Efisiensi	181
BAB IV. PENUTUP	184

LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021



PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
- D. ISU STRATEGIS DAERAH
- E. SUMBER DAYA APARATUR
- F. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
- G. SISTEMATIKA PELAPORAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sampai saat ini masih menjadi agenda prioritas Nasional. *Clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk menata pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa tersebut merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terdapat sembilan aspek fundamental yang merupakan azas dalam perwujudan *good governance* yang menjadi dasar dan upaya penerapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*).

Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Paradigma sebagai *center for public* harus diikuti dengan berbagai aturan sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan efisien, selain itu pemerintah juga harus menjadi *public server* dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pajak.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karena suatu hukum bersifat tegas dan mengikat.

3. Transparansi (*Transparency*).

Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, maka sering terjebak dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak baik.

4. Responsif (*Responsiveness*).

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Orientasi kesepakatan atau Konsensus (*Consensus Orientation*).

Asas konsensus menyatakan bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili selain itu semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin di pertanggungjawabkan.

6. Keadilan dan Kesetaraan (*Equity*).

Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berperilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial.

7. Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*).

Pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran maka pemerintah dalam kategori efisien.

8. Akuntabilitas (*Accountability*).

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

Sejalan dengan itu, birokrasi yang merupakan unsur sumberdaya manusia penyelenggara sistem administrasi pemerintahan, menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan *clean government* dan *good governance* tersebut. Posisi dan peran birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan, karena selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi, kinerja birokrasi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, kinerja birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Provinsi Gorontalo.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sangat jelas mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dimana salah satu entitas pelaporan tersebut adalah Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo penting guna mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Gorontalo;
3. Menjadikan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif.
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Gorontalo terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Gorontalo;
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selalu meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.3. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Gorontalo berada di jazirah utara Pulau Sulawesi, dan telah resmi menjadi sebuah provinsi pasca diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Sesuai koordinat, Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur artinya wilayah Provinsi Gorontalo tepat berada di belahan utara Garis Katulistiwa. Letak geografis Provinsi Gorontalo sangat strategis karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong) di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi (Laut ini berhubungan langsung dengan negara-negara Asia Pasific : Filipina, Taiwan, China dan Jepang) dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Sebagai sebuah provinsi, luas wilayah Provinsi Gorontalo terbilang kecil yaitu hanya 12.435,00 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km². Dari keenam wilayah ini, Kabupaten Pohuwato dengan menguasai 35,83% menjadikannya sebagai Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Gorontalo disusul kemudian oleh Kabupaten Gorontalo dengan persentase luas wilayah terhadap Provinsi Gorontalo adalah 17,24%. Sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53% dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo.

Struktur daratan di wilayah Pulau Sulawesi khususnya Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan

dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Di bawah ini adalah peta administrasi wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 1.3.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, 2010-2030

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.171.681 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,16 persen. Dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 580.322 orang atau 49,53 dan penduduk laki-laki sebanyak 591.349 orang atau 50,47 persen. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 393.107 jiwa atau 33,55 persen, diikuti oleh Kota Gorontalo dengan jumlah penduduk sebesar 198.539 jiwa atau 16,94 persen dan Kabupaten Bone Bolango sebesar 162.778 jiwa atau 13,89 persen serta Kabupaten Pohuwato sebesar 146.432 jiwa atau 12,50 persen dan Kabupaten Boalemo sebesar 145.868 jiwa atau 12,45 persen . Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 124.957 jiwa atau 10,66 persen. (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2021).

Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 65,96 km² memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 47,63 persen. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, dimana Rasio Ketergantungan itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2021).

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan dalam tabel kondisi demografi Provinsi Gorontalo selang tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Tabel 1.3.2.1
Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, distribusi Persentase Penduduk,
KepadatanPenduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		Laju pertumbuhan penduduk per tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)	Rasio jenis kelamin
		2010	2021	2010-2021	2021	2021	2021
1	Kab. Boalemo	129.253	145.868	1,18	12,45	96	104,25
2	Kab. Gorontalo	355.988	393.107	0,96	33,55	225	101,43
3	Kab. Pohuwato	128.748	146.432	1,25	12,50	35	103,66
4	Kab. Bone Bolango	141.915	162.778	1,34	13,89	82	101,23
5	Kab. Gorontalo Utara	104.133	124.957	1,78	10,66	75	104,38
6	Kota Gorontalo	180.127	198.539	0,95	16,94	2.495	98,89
Provinsi Gorontalo		1.040.164	1.171.681	1,16	100,00	104	101,90

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 101,90 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

1.3.3 Kondisi Ekonomi

Semenanjung Gorontalo merupakan salah satu jalur perdagangan di Indonesia sejak zaman dahulu. Sektor pertanian, perikanan dan jasa adalah sektor yang diandalkan di Provinsi ini karena memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Dalam rangka mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan, maka berbagai upaya terus dilakukan. Pemerintah Provinsi melakukan berbagai macam program pembangunan, diantaranya melalui perbaikan infrastruktur sebagai pilar pemacu pembangunan, penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan dana penjamin, peningkatan SDM pertanian, memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar dan lain lain, serta dengan menyusun berbagai program dan kegiatan.

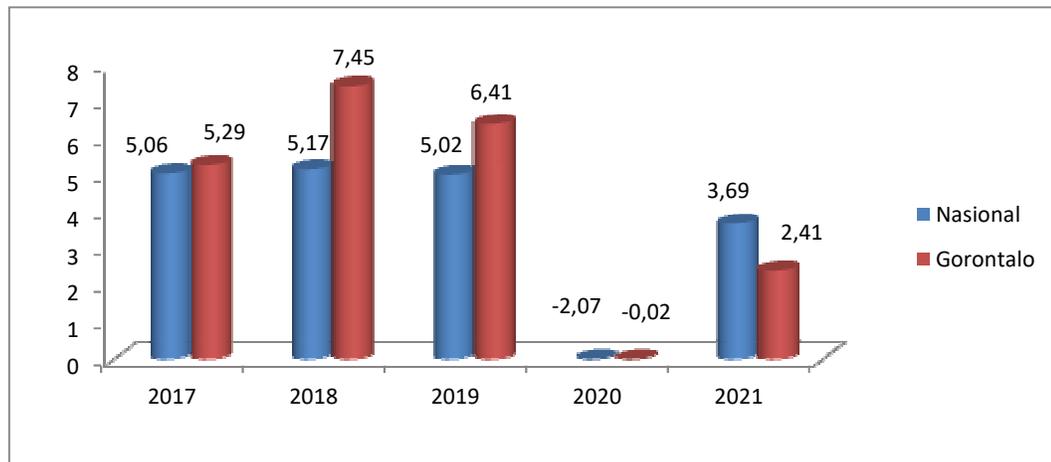
Kawasan laut di Provinsi Gorontalo, terutama di Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini, menyimpan banyak potensi alam karena merupakan satu teluk yang dilalui garis khatulistiwa. Perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan bagi Provinsi Gorontalo yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Garis pantai wilayah Utara dan Selatan masing masing memiliki panjang sekitar 270 kilometer dan 320 kilometer. Potensi sumber daya perikanan di Provinsi Gorontalo berada di tiga perairan, yakni Teluk Tomini (Teluk Gorontalo), Laut Sulawesi, dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi. Provinsi Gorontalo memiliki letak geografi yang strategis untuk perekonomian nasional, kerana memiliki jalur perdagangan yang langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu Provinsi Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang menjadi pintu masuk jalur perdagangan dari benua Amerika ke negara - negara di Asia Pasifik, seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia.

Perekonomian Gorontalo tahun 2021 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 43.896,37 miliar dan atas dasar harga konstan 20210 mencapai Rp 29.109,96 miliar. Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen. Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi Rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,80 persen.

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB tahun 2021, Gorontalo memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) sebesar 2,76 persen dengan pertumbuhan sebesar 2,41 persen.

Gambar 1.3.3.1 berikut akan memperlihatkan kondisi ekonomi Gorontalo Tahun 2017-2021 di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Gambar 1.3.3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 – 2020 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2022

1.4. Isu Strategis

Isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dan dianggap sebagai solusi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dan menjadi kebijakan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo, maka isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo selama periode pemerintahan yaitu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu strategis di Provinsi Gorontalo, masih menjadi permasalahan yang krusial dan membutuhkan kebijakan serta program-program yang menyentuh langsung dalam penanggulangannya. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mencapai 184,60 ribu orang atau sebesar 15,41 persen (sumber: data BPS September 2021). Kondisi ini menurun 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.

Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2021 sebesar Rp.400.504,- per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar RP.308.586,- atau 77,05 persen dan garis kemiskinan bukan

makanan sebesar Rp. 91.918,- atau 22,95 persen. Tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2021, masih di pengaruhi oleh pandemi covid-19.

Dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo masih dihadapkan dengan tingginya angka pengangguran hal ini juga tak lepas dari pengaruh pandemi covid-19. Di tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo sebesar 3,01 persen, menurun 1,27 persen poin jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2021 sebanyak 596.968 orang, dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 579.009 orang dan pengangguran sebanyak 17.959 orang.

Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui :

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Penyediaan dan perluasan akses pangan, Pemberian bantuan pangan non tunai untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota;
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara;
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu ini dititik beratkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata

yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

3. Infrastruktur dasar dan strategis.

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

4. Kualitas sumber daya manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan.

Isu strategis yang terakhir adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan. Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.5. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Pada Akhir tahun 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 5.779 Orang, yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 2.561 Orang atau 44,32 persen dan ASN perempuan sebanyak 3.218 Orang atau 55,68 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.478 orang merupakan tenaga guru. Selain kapasitas sumber daya manusia ASN, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga didukung oleh tenaga honorer berupa tenaga penunjang kegiatan, tenaga medis dan guru yang berjumlah 4.608 orang.

Dari segi kuantitas jumlah aparatur, saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, namun dari segi kualitas berdasarkan tingkatan dan latar belakang pendidikan formal serta dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya masih perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan lanjutan pada jurusan yang masih langka dan strategis, terbatas atau melalui diklat-diklat teknis terutama terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Selain hal tersebut, mulai tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tentunya sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, yang mengharapkan bahwa SDM Indonesia harus berkualitas, berkeahlian, pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan perbaikan komposisi dalam birokrasi untuk mengembangkan fokus SDM aparatur yang mengutamakan kompetensi dan keahlian. Agar simplikasi eselon tidak diartikan sebagai penghapusan jabatan,

namun sebagai langkah untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan berkeahlian. Selain itu, pemetaan jabatan administrator dan pengawas yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional ini bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang. Dengan langkah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Dan pada tanggal 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penetapan dan pelantikan terhadap 286 pejabat struktural yang disetarakan ke jabatan fungsional baik pada jenjang ahli muda maupun ahli madya dengan berbagai nomenklatur jabatan fungsional.

1.6. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan

Urusan Pemerintahan Pilihan serta urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional yang meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kab/Kota dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo di pimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas tersebut terdiri dari : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kab/Kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Gubernur memiliki tugas dan wewenang. Tugas Gubernur dalam hal pembinaan dan pengawasan adalah :

1. Menggordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang ada di wilayah Povinsi Gorontalo;
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kab/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo;
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan perda Kab/Kota tentang RPJMD, RPJPD, APBD, perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Gubernur juga mempunyai kewenangan yang meliputi :

1. Membatalkan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo;
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Gorontalo terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kab/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo; dan
5. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kab/Kota dan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota dan antar Daerah Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan usulan DAK pada Daerah Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo;
- d. Melantik Bupati/Walikota;
- e. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolute dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang di tugaskan di wilayah Daerah Provinsi Gorontalo kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolute dan kepala Instansi Vertikal yang di bentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat Gubernur/perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;

- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi pendukung urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo, yang didalamnya terdapat 6 (enam) Biro yaitu :
 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Biro Hukum;
 - Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi;
 - Biro Organisasi;
 - Biro Pengadaan;
 - Biro Umum.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
 1. Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas kesehatan dengan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas pekerjaan umum, penataan ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
 4. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Datuan polisi pamong praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
6. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Dinas kearsipan dan perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
8. Dinas kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
9. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
10. Dinas pangan dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
11. Dinas pariwisata dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
12. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
13. Dinas pertanian dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. Dinas perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
15. Dinas komunikasi, informatika dan statistik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. Dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;
17. Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

e. Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo terdiri atas:

1. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan keuangan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
3. Badan kepegawaian yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
4. Badan pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan;
5. Badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

Selain perangkat daerah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memiliki 2 (dua) perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki fungsi :
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembinaan politik;
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan serta fasilitasi dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi;
 - Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur dibidang fasilitasi pembinaan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi;

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang memiliki fungsi :
 - Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.7 SISTEMATIKA PELAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang gambaran umum Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diawali dengan penyajian latar belakang serta maksud dan tujuan dari pelaporan kinerja, aspek strategis daerah serta permasalahan utama yang dihadapi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja daerah tahun 2020, rencana kerja dan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

1). Realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pada sub bab ini diuraikan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung capaian target RPJMD.

2). Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3). Realisasi Kinerja lainnya

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja lainnya meliputi :

- Penerbitan kebijakan daerah dalam rangka menyikapi isu-isu strategis yang sedang dihadapi.
- Capaian sasaran utama kinerja daerah.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini akan menguraikan simpulan atas pencapaian kinerja daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021
- E. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021
- F. PENGUKURAN KINERJA
- G. INSTRUMEN PENDUKUNG

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan perencanaan jangka menengah yang bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan jangka pendek dalam satu tahunan berupa RKPD Provinsi Gorontalo atau Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Gorontalo (RKT). RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022. RPJMD 2017 - 2022 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju dan Mandiri.

Rencana Strategis (RENSTRA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dijiwai oleh komitmen dalam mewujudkan percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi

Gorontalo. Komitmen ini tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1.1. VISI

Salah satu pedoman yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025 dan RPJMN 2015-2019. Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo 2017-2022 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera

Visi ini merupakan bingkai utama atau frame strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunan di Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun ke depan sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :

1. **Gorontalo Maju dan Unggul**, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.
2. **Gorontalo Sejahtera**, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan

dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

2.1.2 MISI

Untuk pencapaian visi daerah selang 5 (lima) tahun ke depan, maka misi pembangunan yang diemban Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2022

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : " Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera "		
Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan
	Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : " Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"		
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq
	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman
Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.1.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang disajikan dengan cukup terperinci sebagai pendetilan dari Visi dan Misi, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan, yang dipopulerkan dengan Delapan Prioritas Daerah (8 PD). Hingga tahun ke empat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan yaitu :

1. **Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global;
2. **Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo;
3. **Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo;
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman;

6. **Agama dan Budaya;** Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak;
7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaiki infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international;
8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang dirumuskan dalam RPJMD telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah program prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan agar lebih optimal pencapaiannya serta menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo saat ini dan dimasa mendatang.

Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat Perangkat Daerah. Program unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah

berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Selain untuk mempercepat pencapaian sasaran utama pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana keselarasan pembangunan Nasional dengan pembangunan Daerah yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022

No	Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024	Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Ekonomi kerakyatan yang meningkat
		Pariwisata lebih mendunia
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	-
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan yang lebih berkualitas Kesehatan lebih prima
3.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Agama dan budaya yang lebih semarak
4.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur lebih merata
5.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Lingkungan hidup lebih lestari
6.	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Pemerintahan lebih melayani

Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 di fokuskan pada penguatan sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi, dimana penguatan sektor kesehatan akan ditempuh melalui optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemulihan kondisi sosial ekonomi akan dilaksanakan melalui penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan ketahanan ekonomi. Fokus pembangunan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 yang mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Fokus pembangunan tahun 2021 juga ditetapkan dalam upaya menyikapi adanya covid-19 yaitu untuk sektor kesehatan dan sektor sosial ekonomi.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2018 – 2022 sesuai periode Kepemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga termuat dalam dokumen RPJMD periode 2017-2022 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo.

IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo

MISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH MERATA DAN ADIL.			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara/Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan

Inklusif dan Berkeadilan		<p>yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Rumus :</p> $Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan)</p> <p>PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan)</p> <p>PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p>
	Indeks Gini	<p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</p> <p>Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana,</p> <p>GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)</p> <p>P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>
	PDRB Perkapita AHB (juta Rp)	<p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi</p>

			dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Penerimaan yang sah
		Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja : $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$

MISI : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$

			<p>Dimana:</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z =gariskemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>
--	--	--	---

MISI : TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN LEBIH MELAYANI

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Sumber: Pergub Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022

2.3. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada program sehingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih fokus dan terinci sampai dengan penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu kesatuan dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian / Lembaga di Pemerintah Pusat sampai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah. Perencanaan yang lebih terinci tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditingkat Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 menjadi penjabaran tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yang juga merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing - masing perangkat daerah maupun seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen tersendiri yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi

Gorontalo ini, yang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang juga merupakan instrumen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoperasionalkan RPJMD serta memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD. Rencana kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang dan Inklusif Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	5,97-6,62*
		Indeks Gini	0,415-0,380*
		PDRB Perkapita AHB (juta Rp)	37.560.000*
		Peningkatan Pendapatan Daeah (Rp)	2,58 Triliun
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,92-4,01*
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	68,45-69,95*
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	16,01-15,05*
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

* Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo

Tabel 2.3.2
Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target
1	2	3
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Pertumbuhan Ekonomi %	5,97-6,62
2	IPM	68,45-69,95
3	PDRB per kapita AHB (juta Rp)	37.560.000
4	Laju inflasi provinsi (%)	3,42
5	Indeks Gini	0,415-0,380
6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, trilyun)	2,58
7	Persentase penduduk miskin (%)	16,01-15,05
Fokus Kesejahteraan Sosial		
1. Pendidikan		
1.1	Angka melek huruf (%)	99,98
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	7,70
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%)	77,63
2. Kesehatan		
2.1	Usia Harapan Hidup	67.92
Fokus Seni Budaya		
3. Kebudayaan		
3.1	Jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	3 jenis
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Pelayanan Urusan Wajib		
4. Keluarga Berencana		
4.1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2.45
5. Pekerjaan Umum		
5.1	Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	65,20
5.2	Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	267,519
6. Perumahan		
6.1	Prosentase cakupan akses air minum yang layak (%)	81,00
6.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	67,71
6.3	Persentase penurunan luas Kawasan kumuh (%)	40

7.	Lingkungan Hidup	
7.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	73,39
8.	Sosial	
8.1	Penduduk Miskin (orang)	188,153
9.	Ketenagakerjaan	
9.1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3.55
10.	Pemerintahan	
10.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	BB
10.2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB
10.3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
10.4	Survey kepuasan masyarakat	75
10.5	Indeks tata kelola Pemerintahan	6,07
11.	Ketahanan Pangan	
11.1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	66.6
11.2	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	84,4
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12.1	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal)	97
13.	Komunikasi dan Informatika	
13.1	Indeks E-Government	3.83
14.	Penanggulangan Bencana	
14.1	Indeks resiko bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00)	0,37-0,71
Pelayanan Urusan Pilihan		
15.	Pertanian	
15.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,63
15.2	Persentase Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	13.813,97
15.3	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	104,12
16.	Kehutanan	
16.1	Luas lahan kritis (Ha)	1,000
17.	Pariwisata	
17.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	7,599
17.2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	722.879
18.	Kelautan dan Perikanan	
18.1	Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN)	101.70

Rencana Kerja dan pendanaan pembangunan daerah untuk tahun 2020, disajikan dalam program kegiatan beserta pagu indikatif. Terkait hal tersebut, seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 mengacu pada program kegiatan tersebut. Alokasi anggaran program-program strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Alokasi Anggaran Program Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,042,434,570
		Program Penataan Organisasi	187,409,746
		Program Kesejahteraan Rakyat	21,042,266,887
2	BIRO ORGANISASI	Program Penataan Organisasi	1,029,129,375
3	BIRO HUKUM	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	564,602,531
		Program Pendampingan Layanan dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	2,160,310,100
4	BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	Program Perekonomian dan Pembangunan	253,314,313
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	5,618,722,414
5	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	18,293,368,907
6	BIRO PENGADAAN	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1,025,969,673
7	INSPEKTORAT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,233,902,955
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	697,592,900
8	SEKRETARIAT DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	62,810,542,433
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	8,273,698,148

9	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Pengelolaan Pendidikan	59,880,998,094
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	948,010,857
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	2,232,407,000
		Program Pengembangan Kebudayaan	181,709,528
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	890,895,623
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	391,784,102
		Program Keolahragaan	2,020,020,000
		Program Kepemudaan	129,973,000
10	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77,717,363,135
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	332,121,518
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	322,347,721
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	946,660,530
		Program Pengendalian Penduduk	72,939,770
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	210,844,018
		Program Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3,512,809,000
		Program Intervensi Stunting	633,189,000
		Program Operasional Kesehatan	4,496,686,000
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	983,898,712
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,558,366,658
		Program Pengembangan Permukiman	7,610,226,582
		Program Penataan Bangunan Gedung	4,440,506,160
		Program Penataan Bangunan Lingkungan	505,913,880
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	701,033,190
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	10,372,280,460

12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pembangunan Perumahan	1,021,722,433
		Program Kawasan Permukiman	14,412,088,583
13	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	853,630,809
		Program Pemberdayaan Sosial	1,541,049,963
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20,152,342,425
		Program Penanganan Bencana	724,940,205
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	166,850,544
		Program Rehabilitasi Sosial	3,775,399,649
		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2,194,129,378
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	62,499,742
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	99,999,518
		Program Perlindungan Khusus Anak	663,221,955
14	DINAS PENANAMAN MODAL ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,343,379,364
		Program Hubungan Industrial	425,494,455
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	187,719,377
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,999,791
		Program Promosi Penanaman Modal	207,560,522
		Program Pelayanan Penanaman Modal	359,219,734
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	652,967,458
		Program Pengelolaan Aspek Geologi	538,979,036
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	493,352,283
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	315,239,834
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1,088,199,867
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	498,919,562

15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Program Pendaftaran Penduduk	67,307,500
		Program Pencatatan Sipil	1,029,750,282
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32,620,719
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	244,999,498
		Program Pemerintahan Desa	595.524.681
		Program Lembaga Kemasayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,191,250,935
16	DINAS PANGAN	Program Kawasan Pangan	333,709,512
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,057,384,248
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	235,519,942
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Program Pengelolaan Aliran Sungai	163,559,181
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	142,499,987
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	101,299,834
		Program Pengelolaan Hutan	1,981,903,754
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	125,159,727
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	109,947,904
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1,649,558,001
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	60,193,991
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	420,299,990
18	DINAS PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4,062,380,332
		Program Pengelolaan Pelayaran	255,170,464
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	833,144,743
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,408,420,338

		Program Penyelenggaraan Statistik Sektorat	532,118,817
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	122,908,585
20	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	138,952,849
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2,453,170,196
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	283,950,054
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	199,999,549
		Program Pengembangan UMKM	460,299,670
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,345,493,553
		Program Pengembangan Ekspor	101,997,933
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	731,842,591
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,809,506,519
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	154,318,904
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pengelolaan Arsip	142,985,162
		Program Perlindungan dan Penyelematan Arsip	72,014,727
		Program Pembinaan Perpustakaan	204,055,647
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11,336,092
		Program Perpustakaan dan Literasi	479,461,000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,798,763,647
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	13,352,172,967
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,085,359,670
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,026,960,000
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3,418,520,836
23	DINAS PARIWISATA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2,371,676,816
		Program Pemasaran Pariwisata	879,257,271

		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	452,639,964
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	255,439,468
24	DINAS PERTANIAN	Program Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2,107,085,038
		Program Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4,872,763,264
		Program Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	3,279,136,535
		Program Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumberdaya dari Daerah Provinsi Lain	2,191,720,142
		Program Penataan Sarana Pertanian	3,792,715,780
		Program Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/Kota dalam satu Daerah Provinsi	486,530,185
		Program Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	370,849,712
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	692,164,569
		Program Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	427,417,701
		Program Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2,649,099,093
		Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	168,823,679
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	10,641,811,00
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	39,611,623,000
		Program Dukungan Manajemen	5,809,441,000
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3,821,091,000		

25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,462,005,986
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	399,049,164
26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	859,970,445
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,055,333,340
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,330,552,085
		Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1,340,483,000
		Program Bina Administrasi Wilayah	447,000,000
27	BADAN KEUANGAN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	226,466,432,389
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,500,004,210
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,969,393,893
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Penataan Organisasi	8,920,000
		Program Kepegawaian Daerah	1,811,931,437
29	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	779,771,500
		Program Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6,793,689,186
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Potilik	1,557,614,303
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,247,174,885
		Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89,619,157
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,340,011,012
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	412,184,595

31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana	4,369,412,000
32	BADAN PENGHUBUNG	Program Penataan Organisasi	343,765,511
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	687,729,352

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 telah disusun dan ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo memuat sasaran strategis daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lain yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1. Wisatawan Mancanegara (orang)	7,559
		2. Wisatawan Nusantara (kunjungan)	722,879
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	3. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	13,813,97
3.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	4. Skor PPH Ketersediaan	66,6
		5. Skor PPH Konsumsi	84,4
		6. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	101,7
		7. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	104,12
4.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	8. Indeks Resiko Bencana	0.37 - 0.71
		9. Luas Lahan Kritis	1,000 ha

5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	10.	Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik	267,52 km
		11.	Indeks E-Government	3.83
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	12.	Pertumbuhan Ekonomi	5,97-6,62
		13.	Laju Inflasi (%)	3,42
		14.	Indeks Gini	0,415-0,380
		15.	PDRB Perkapita	37,560,000
		16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,04
		17.	Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	2,58
7.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	18.	Indek Pembangunan Manusia	68,01-15,05
		19.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,63 %
		20.	Angka Melek Huruf	99,98
8.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	21.	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2.45
9.	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	22.	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	3 jenis
		23.	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0.24
10.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24.	Persentase Angka Kemiskinan	16,01-15,05
11.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	25.	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	81,00 %
		26.	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	67,71 %
		27.	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20 %
12.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	28.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Penandatanganan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan pada bulan Januari 2021 oleh Gubernur Gorontalo dan selanjutnya dilakukan secara berjenjang oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 disajikan dalam Lampiran-1.

2.5. PENGUKURAN KINERJA

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara periodik seluruh unit kerja menyampaikan perkembangan rencana aksinya melalui sistem aplikasi e-Monev (elektronik-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan). Selanjutnya setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (rapat pimpinan) yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan capaian kinerja;
2. Mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuansasaran;
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran;
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja;
7. Sebagai salah satu komponen penilaian kinerja.

2.6. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, digunakan instrument-instrumen yang mendukung dan berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, dimanfaatkan dengan tepat dan cermat guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan serta membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat secara cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu berbenah untuk memanfaatkan segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha upaya meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja

baik dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Gorontalo maupun dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2021 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Perencanaan

Sistem Informasi Perencanaan, SIPD (<http://sipd.kemendagri.go.id>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.5. Website Sistem Informasi Perencanaan

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan dengan alamat akses <https://e-monep.gorontaloprov.go.id/login> adalah suatu sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang dikembangkan untuk mempermudah perangkat daerah dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan sebagai penilaian kinerja setiap perangkat daerah. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



Gambar 2.6 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi

3. Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Alamat akses <https://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc/>



Gambar 2.7 Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

4. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) dan transparansi (*Transparency*) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan yang diikuti oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo, mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).



Gambar 2.8 Aplikasi Simda

5. Sistem Informasi Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija)

Pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) ASN dengan menggunakan 3 (tiga) unsur dalam Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong. Nilai yang diperoleh dari Aplikasi ini digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja.



Gambar 2.9. Aplikasi Siransija Provinsi Gorontalo

6. Sistem Aplikasi e-GERMAS (Sistem Informasi Manajemen Data Program Kegiatan Masyarakat Hidup Sehat)

Manfaat aplikasi e-GERMAS untuk mendapatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat, meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS, memudahkan proses monitoring dan evaluasi, memudahkan dalam penentuan capaian OPD dan Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan program GERMAS serta sebagai alat kontrol dan pengawasan.



Gambar 2.10. Aplikasi Sistem Aplikasi e-GERMAS

7. Sistem Informasi Aplikasi e-RTS

Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan Rumah Layak huni (MAHYANI).



Gambar 2.11. Website Sistem Informasi e-RTS

8. Sistem Informasi e-JPS (Jaring Pengaman Sosial)

Sistem informasi manajemen data program keluarga penerima manfaat Provinsi Gorontalo. Pengolahan data program pemberian bantuan berupa uang tunai atau bantuan sosial lainnya kepada Rumah Tangga berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. e-JPS ini adalah Sebagai alat kontrol, monitoring dan evaluasi program bantuan sosial (Jaring Pengaman Sosial) yang di salurkan oleh pemerintah.



Gambar 2.12. Screenshot Aplikasi e-JPS

9. Sistem aplikasi pengawasan pembangunan

Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini telah membangun sistem aplikasi untuk memudahkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sistem aplikasi ini dibangun dalam upaya menjawab tantangan di tengah wabah covid-19, dimana terdapat keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan pengawasan secara langsung dilapangan. Aplikasi tersebut adalah:

- Siwasbang yang kegunaannya untuk melihat perkembangan pekerjaan dilapangan. Setiap pengawas wajib mengisi progres per minggu dan disertai dengan foto. Aplikasi ini dibangun untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan serta tindaklanjutnya agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Sijakon untuk informasi keberadaan tenaga kerja konstruksi.
- SieF Laboratorium untuk memudahkan para pendaftar pengujian material.



Gambar 2.13. Aplikasi pengawasan pembangunan Infrastruktur

10. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

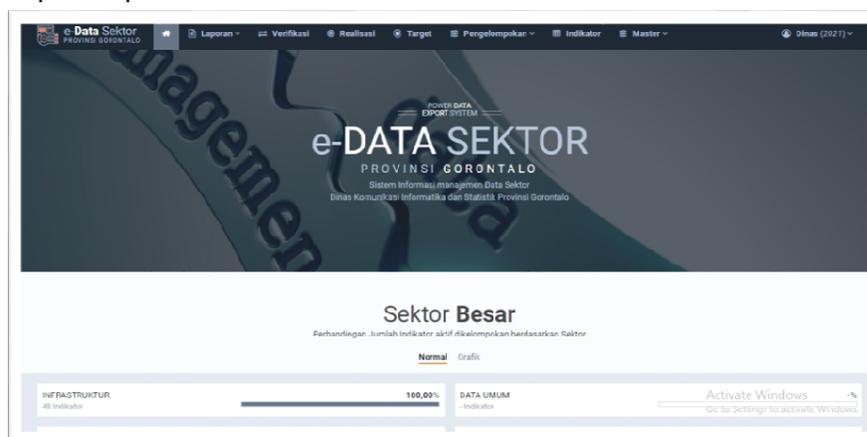
Aplikasi SIRUP adalah sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SIRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa.



Gambar 2.14. SIRUP

11. Sistem Informasi Metadata Sektor

Aplikasi ini merupakan layanan digital yang menyediakan informasi kabar berita pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Tidak hanya itu, kebutuhan informasi masyarakat berupa layanan Samsat, kepegawaian, statistik data, serta kebutuhan informasi publik lainnya dapat diakses pada aplikasi ini.



Gambar 2.15. Sistem Informasi Metadata Sektor

12. Sistem Informasi PPID

Sistem Informasi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengakses secara luas berbagai informasi dan dokumentasi dan mengambil manfaat dari informasi yang terkandung didalamnya.



Gambar 2.16. Sistem Informasi PPID

13. Sistem Informasi Perjalanan Dinas

Aplikasi sistem informasi perjalanan dinas merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pemantauan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, baik dalam penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban perjalanan dinas. Aplikasi ini dapat diakses di: sppd.gorontaloprov.go.id



Gambar 2.17. Sistem Aplikasi SimPD

14. Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Alamat akses: <https://lpse.gorontaloprov.go.id/eproc/>



Gambar 2.18. Sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

15. Aplikasi Peta Potensi Investasi Provins Gorontalo (APPIG)

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah membangun sistem aplikasi yang bertajuk peta potensi investasi. Sistem aplikasi ini menyediakan informasi potensi investasi yang tersebar di Wilayah Provinsi Gorontalo secara berkala. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sistem aplikasi ini dapat digambarkan sebagaimana gambar 2.19 sebagai berikut:



Gambar 2.19. Aplikasi APPIG Provinsi Gorontalo

16. Aplikasi MO'OTAME (bisa membantu)

Sistem informasi ini dikembangkan adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna perizinan. Sistem ini memudahkan pemohon untuk melakukan *tracking* proses pelaksanaan perizinan yang diurus secara berkala. Aplikasi ini dapat diakses melalui android sehingga dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Aplikasi MOOTAME sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPAMOR (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor), dimana pemohon izin yang belum dapat melunasi pajak kendaraan bernetornya dapat dipantau melalui aplikasi ini. Dengan integrasi antara kedua aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

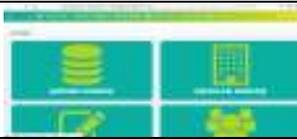


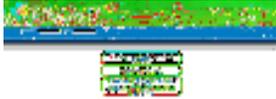
Gambar 2.20. Aplikasi MOOTAME

17. Sistem Aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung kinerja sektor kesehatan di Provinsi Gorontalo.

Dalam rangka melakukan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun dan mengembangkan berbagai sistem aplikasi sebagai berikut:

No	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Alamat	Gambar/Foto Aplikasi
1	Webiste Dinas Kesehatan Provinsi	Memberikan Informasi Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	dinkes.gorontaloprov.go.id	
2	Sistem Monitoring dan Evaluasi STBM	Memantau pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	monev.stbm.kemkes.go.id	
3	Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga	Melaporkan program dan indikator kesehatan kerja dan olahraga	http://sitko-kesjaor.id	
4	Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran	Mengukur kebugaran jasmani secara mandiri	https://sipgar.id/	
5	Sistem Pelaporan Elektronik Pedagang Besar Farmasi	Memantau dinamika obat, bahan baku obat dan NPP di Provinsi Gorontalo	http://pbf.binfar.kemkes.go.id/	

No	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Alamat	Gambar/Foto Aplikasi
6	Aplikasi e-Report Alat Kesehatan dan PKRT	Pelaporan hasil produksi dan penyaluran Alat Kesehatan oleh Produsen	http://e-report.alkes.kemkes.go.id	
7	Aplikasi Perizinan Sarana Distribusi Alkes	Menerbitkan Sertifikat Produksi Alkes, Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	http://sertifikasialkes.kemkes.go.id/	
8	Aplikasi SIMADA	Melaksanakan Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara realtime	https://simada.binfar.kemkes.go.id/	
9	Sistem Pelaporan Narkotika dan Psicotropika	Mendaftarkan obat dan berhubungan dengan farmasi	http://sipnap.kemkes.go.id/	
10	Aplikasi Keluarga Sehat	Aplikasi ini berguna untuk memudahkan proses pendataan Nomor Induk Kependudukan menjadi lebih terintegrasi dan terpadu.	https://keluargasehat.kemkes.go.id/	
11	Aplikasi Surveilans Posbindu PTM	Mengakses saran/rekomendasi dari hasil proporsi faktor risiko PTM dan cakupan di tingkat Provins	https://surveilans-pptm.kemkes.go.id/	
12	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan	Mengetahui Informasi kegiatan pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji	siskohatkes.kemkes.go.id	
13	Sistem Informasi Hepatitis dan PISP	Memudahkan Pelaporan untuk Penyakit Diare, Typoid dan Hepatitis	http://sihepi.kemkes.go.id/	

No	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Alamat	Gambar/Foto Aplikasi
'14	Sistem Informasi Hiv Aids	Memberikan Informasi Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Layanan Baik Itu Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Swasta Ataupun Klinik Pada Lembaga Negara Seperti Lepas Dan Kementerian Perhubungan	https://siha.kemkes.go.id/	
15	Sistem Informasi TB	Memberikan Informasi kasus TB Sensitif, TB Resistan Obat, laboratorium dan logistik	http://sitb.id/sitb/app	
16	Aplikasi Komdat (Komunikasi Data)	Menampilkan data dan informasi kesehatan secara berkala yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi	https://komdat.kemkes.go.id/	
17	Aplikasi Komdat SPM	Menampilkan data capaian pelayanan SPM secara berkala yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.	http://komdat.kemkes.go.id:8080/login/?next=/	
18	Aplikasi Satu Data Kesehatan	Memudahkan Pencarian data kesehatan yang berasal dari berbagai macam aplikasi kesehatan	https://data.kemkes.go.id/	



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
- B. CAPAIAN KINERJA PENDUKUNG IKU TAHUN 2021
- C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis, juga indikator pendukung lainnya yang mendukung pencapaian IKU. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD/Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Kinerja Tahun 2021 merupakan kinerja tahun keempat RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo 2017-2022. Capaian kinerja pada tahun 2021 masih banyak dipengaruhi oleh kondisi daerah yang sedang menghadapi pandemi covid-19 yang pastinya mempengaruhi pelaksanaan seluruh sektor pembangunan sehingga capaian kerjanya tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 ini umat manusia diseluruh penjuru dunia masih digoncang pandemi Virus Corona (Covid-19). Sejak diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal Maret 2020, sendi-sendi kehidupan manusia terpaksa harus mulai menanggung kesengsaraan akibat efek negatif yang dibawa serta. Tidak terelakkan pandemi ini juga membawa dampak luar biasa kepada Indonesia dan tentunya juga di Provinsi Gorontalo.

Terhadap sektor kesehatan, akses dan kualitas kesehatan ternyata masih belum cukup dalam mengantisipasi pandemi yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan.

Fasilitas kesehatan yang tersedia ternyata masih butuh untuk ditingkatkan lagi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan mandiri dan keluarga, masih jauh dari target yang seharusnya.

Terhadap sektor ekonomi di Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh Covid-19, yaitu meningkatkan jumlah pengangguran, baik yang berasal dari sektor formal maupun informal, yang secara langsung juga berimplikasi terhadap peningkatan jumlah angka kemiskinan. Aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor, juga mengalami penurunan disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat. Penurunan pendapatan juga dipastikan dialami oleh sebagian besar masyarakat, diakibatkan menurunnya harga komoditas barang.

Dalam kondisi ditengah pandemi tersebut, Provinsi Gorontalo tetap melakukan upaya-upaya pencapaian kinerja pembangunan. Pada tahun 2021 capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 87,71 persen yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja IKU. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 83,64, capaian di tahun 2021 ini meningkat sebesar 4,07 persen. Dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya di periode RPJMD 2017-2022, capaian kinerja di tahun 2021 ini masih memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam meningkatkan pencapaian target kinerja. Adapun capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Sebelum menguraikan lebih lanjut capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021, akan diuraikan terlebih dahulu rumus pengukuran kinerja yaitu dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Perhitungan realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi, menunjukkan semakin rendah capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus perhitungan atas realisasi kinerja diatas, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2021
Pemerintah Provinsi Gorontalo

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	5,97 %	2,41 %	40,37
			Indeks Gini	0,415	0,409	101,45
			PDRB Perkapita (Rupiah)	37,560,000	37,464,438	99,75
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,01 %	3,01 %	124,94
			Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	2,27	1,97	86,78
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	68,45	69,00	100,80
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	15,05%	15,41%	97,61
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerrintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	50,00

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Daerah, LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021

Dari uraian tabel 3.1 mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo tergambar bahwa dari 4 (empat) capaian sasaran strategis tersebut, sebagian besar kinerja dalam kategori sangat baik yang digambarkan dengan warna "hijau tua". Seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan awal dari bab 3 ini bahwa, capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi global covid-19, utamanya pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain tingkat

pertumbuhan ekonomi, indeks reformasi birokrasi juga masih belum mencapai target. Kategori dari indeks reformasi birokrasi ini merupakan capaian tahun 2020.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab 2, terkait penetapan target kinerja IKU tahun 2021, bahwa terdapat perubahan target terhadap beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo. Perubahan target-target kinerja tersebut sebagian besar adalah indikator kinerja makro yang pencapaian kerjanya diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan seluruh stakeholders yang terkait yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Indikator kinerja yang mengalami perubahan target kinerja tersebut adalah pada indikator pertumbuhan ekonomi, indeks gini, target pencapaian pendapatan daerah, PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Inflasi.

Selanjutnya, terhadap berbagai target capaian kinerja, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan melakukan langkah-langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan masalah dimasa mendatang. Adapun hasil analisis pada pencapaian masing-masing sasaran strategis akan disajikan berdasarkan tiap tujuan masing-masing sebagai berikut :



Tujuan 1 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang dijabarkan dalam sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan pertama ini sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan dicapai dan diukur dengan menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pendapatan Daerah, dimana kelima indikator kinerja utama ini dianggap mampu menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan. Selanjutnya, akan dianalisis per indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,51 %	6,41 %	- 0,02%	5,97%	2,41%	40,37	7,27	33,15
2	Indeks Gini	0,42	0,410	0,406	0,415	0,409	101,45	0,36	86,39
3	PDRB Perkapita	31.831.738,27	34.217.140,05	34.213.450,12	37.560.000	37.464.438	99,75	28.155.865,91	133,06
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03 %	4,06 %	4,28%	4,01%	3,01%	124,94	2,86	94,76
5	Pendapatan Daerah (RP. Triliun)	1,79	1,89	1,81	2,27	1,97	86,78	2,99	65,89

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

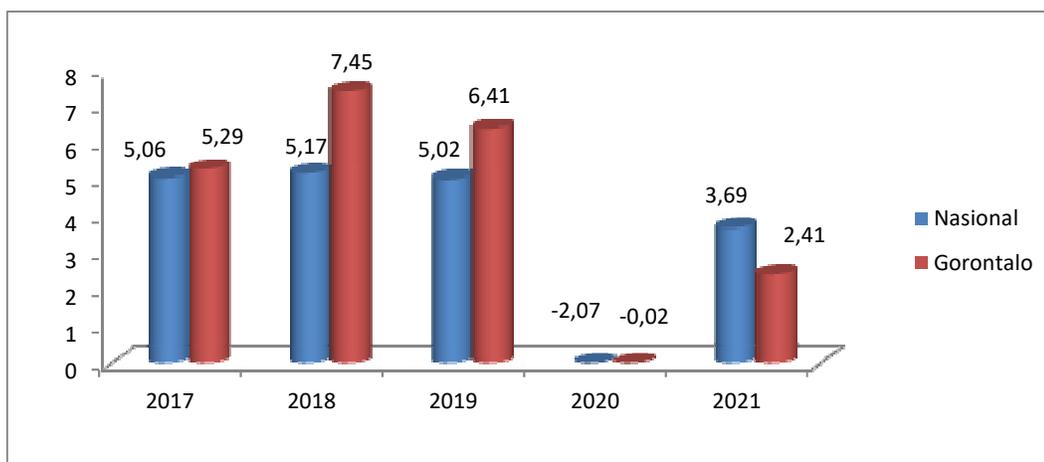
Pertumbuhan Ekonomi : Perekonomian Gorontalo tahun 2021 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp. 43.896,37 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 29.109,96 milyar. PDRB per kapita Gorontalo tahun 2021 sebesar Rp. 37,464,438.

Ekonomi Gorontalo tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,97

persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 10,97 persen.

Dari tabel 3.1.1 perbandingan realisasi kinerja dan capaian s.d akhir RPJMD tahun 2022, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 6,51 persen. Sementara itu, Capaian kinerja di tahun 2019 juga belum sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 7,19 persen pertumbuhan ekonomi, dimana capaian kinerja makro daerah ini di tahun 2019 sebesar 6,41 persen. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar - 0,02%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02 persen sepanjang tahun 2019, dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07 persen, dan pada tahun 2021, ekonomi Nasional tumbuh sebesar 3,69 persen. Pada tabel 3.1.2 berikut ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan Nasional sebagai berikut :

Gambar 3.1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2017 – 2020 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2022

Indeks Gini : Indikator kinerja selanjutnya yang digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo adalah Indeks Gini atau Gini Ratio. Indeks Gini atau Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan

distribusi pendapatan penduduk. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna atau dengan kata lain terjadi ketimpangan yang sempurna.

Dari tabel 3.1.1 diatas, dapat dilihat bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 0,410. Dibandingkan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin atau dengan kata lain terdapat kenaikan ketimpangan pendapatan di masyarakat Gorontalo. Dan pada tahun 2020, Gini Rasio Provinsi Gorontalo sebesar 0,406 menurun sebesar 0,004 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebesar 0,409. Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah:

- a. Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret 2021-September 2021 mengalami peningkatan mencapai 3,65 persen.
- b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 4,06 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 3,46 persen dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 3,36 persen.
- c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 3,26 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di daerah perdesaan yang sebesar 3,75 persen.

Dibandingkan dengan tingkat Gini Ratio Nasional tahun 2021 dimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,381, maka gini ratio di Provinsi Gorontalo tahun 2021 masih relatif tinggi. Begitu pula bila dibandingkan dengan Gini Ratio daerah-daerah lainnya di Indonesia khususnya yang berada di wilayah Sulawesi, Provinsi

Gorontalo masih yang tertinggi, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 3.1.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Daerah Lain

No.	Provinsi	Indeks Gini
1	2	3
1	Gorontalo	0,409
2	Sulawesi Utara	0,359
3	Sulawesi Tengah	0,326
4	Sulawesi Selatan	0,377
5	Sulawesi Tenggara	0,394
6	Sulawesi Barat	0,366

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

PDRB Perkapita : Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasilnya dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer kearah sekunder dan tersier. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan nasional atau regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang duhasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan

salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Dari tabel 3.1.1 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp. 34.217.140,05,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.903.975,97,- atau capaian sebesar 122,63 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni : Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 38,93 persen serta Kategori Konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,67 persen. Sementara itu, PDRB per kapita tahun 2020 sebesar Rp. 34.213.450,12,- angka ini turun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019. Struktur PDRB Gorontalo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi Rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo sebesar 61,98 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,02 persen, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,18 persen serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,76 persen. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 37,464,438, dimana aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen PK-RT (pengeluaran konsumsi rumah tangga) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 61,80 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,21 persen, ekspor barang dan jasa sebesar 26,06 persen serta komponen P-KP (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebesar 19,77 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka : Tingkat pengangguran (terbuka) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen dengan rumus jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 persen.

Pada tahun 2020, target kinerja yang akan dicapai dalam upaya penurunan angka pengangguran di Provinsi Gorontalo sebesar 3,23 persen. Dari target tersebut, terealisasi sebesar 4,28 persen atau capaian sebesar 75,50 persen. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019, dimana tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo berada pada angka 4,06 persen. Maka capaian di tahun 2020 mengalami kenaikan angka pengangguran terbuka sebesar 0,22 persen atau pengangguran bertambah sebanyak 3.028 orang. Dan pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo kembali turun menjadi 3,01 persen atau capaian sebesar 124,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,01 persen. Angka pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo di tahun 2021 ini turun sebesar 1,27 persen dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2021, dimana terdapat perubahan target kinerja yang didasarkan pada hasil kesepakatan pada pembahasan Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo bersama kementerian terkait, bahwa tingkat pengangguran terbuka dengan target semula sebesar 3,04 menjadi 4,01 persen. Kinerja terhadap penanganan tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo mulai membuahkan hasil yang ditandai dengan turunnya angka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2021 menjadi 3,01 persen atau capaian sebesar 124,94 persen.

Situasi ketenagakerjaan tahun 2021 masih dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemic covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran pada Agustus 2021. Dampak pandemic covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak.

Intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo khusus disektor ketenagakerjaan, seperti pelatihan melalui Balai latihan Kerja (BLK), Pemagangan Berbasis pengguna tidak mampu menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo. Pada tabel 3.1.4 dibawah ini akan menggambarkan/menginformasikan tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo
Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Angkatan Kerja	547.766	578.880	585.896	593.97	596.968
	• Bekerja	524.316	555.533	562.087	568.56	579.009
	• Penganggur	23.450	23.347	23.809	25.41	17.959
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,28	4,03	4,06	4,28	3,01
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,78	67,34	66,83	66,46	65,94

Sumber: BPS Prov. Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.1.4 dapat diketahui perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2017, angkatan kerja sebanyak 547.766 orang dengan orang yang bekerja sebanyak 524.316 orang dan pengangguran sebanyak 23.450. Dengan kondisi ini, menjadikan TPT tahun 2017 Provinsi Gorontalo sebesar 4,28 persen dan TPAK sebesar 64,78 persen. Tahun 2018 sebanyak 578.880 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sebanyak 555.533 orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 23.347 orang menganggur. Disbanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 31.217 orang sedangkan pengangguran berkurang 103 orang. sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK tahun 2018 tercatat sebesar 67,34 persen, meningkat 2,56 poin disbanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan pasokan tenaga kerja.

Untuk kondisi ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tahun 2019, jumlah angkatan kerja sebanyak 585.896 orang naik 7.016 orang dibandingkan tahun 2018. Sebanyak 562.087 orang penduduk bekerja, naik sebesar 6.554 orang dibandingkan tahun 2018 dan sebanyak 23.809 orang menganggur bertambah 462 orang dibandingkan tahun 2018. Dari kondisi tersebut, terdapat pengangguran terbuka sebesar 4,06 persen, naik sebesar 0,03

poin dibandingkan kondisi tahun 2018 dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,83 persen menurun sebesar 0,51 poin dibandingkan kondisi tahun 2018. Pada tahun 2020, dimana pandemic covid-19 mulai melanda, pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo mencapai 4,28 persen. Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dimana tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2020 sebesar 7,07 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang dan 9,77 juta orang penganggur.

Tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan mulai bergeliat ditengah masih merebaknya pandemi covid-19. Angkatan kerja di tahun 2021 tepatnya di Agustus sebesar 596.968 orang dengan rincian 579.009 orang penduduk bekerja dan 17.959 orang pengangguran, dimana 21,13 persen diantaranya merupakan pengangguran karena dampak covid-19. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 menurun sebesar 1,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.

Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Gorontalo

Dengan adanya pandemi, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut berdampak tak terkecuali juga pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia, terasuk di Provinsi Gorontalo. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut berdampak dengan adanya pandemi ini.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: (*sumer : BPS Provinsi Gorontalo*)

- a. Pengangguran akibat Covid-19 sebanyak 3.795 orang.
- b. Bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebanyak 2.515 orang.
- c. Sementara tidak bekerja karena Covid-19. Sebanyak 5.144 orang.
- d. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 sebanyak 56.602 orang penduduk.

Pendapatan Daerah : Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah

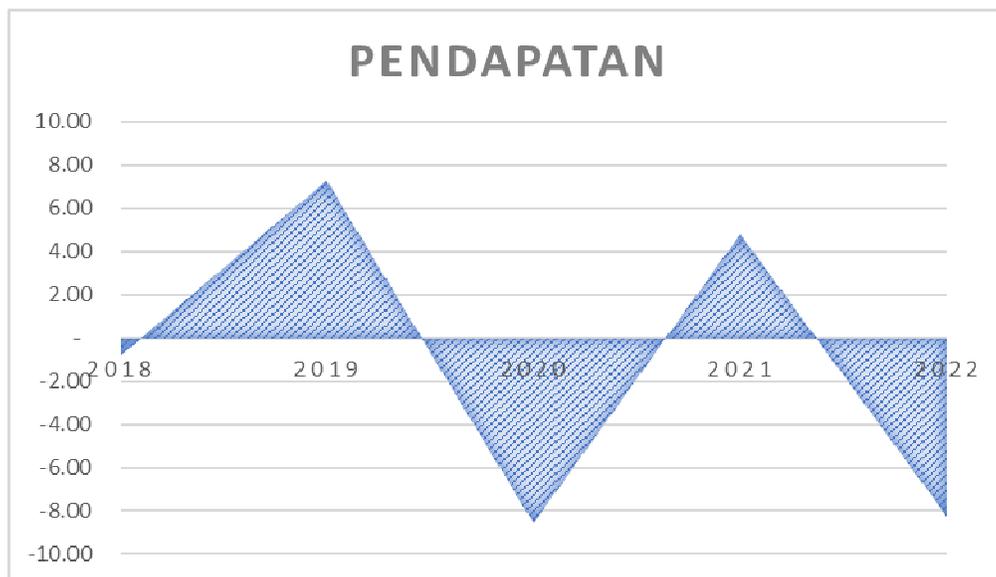
dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dari tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 1,89 Triliun Rupaiah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,02 Triliun Rupah. Capaian yang diperoleh di tahun 2019 ini, belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja atas pendapatan daerah di tahun sebelumnya, sebesar 1,80 Triliun Rupiah, maka capaian kinerja di tahun 2019 ini meningkat sebesar 0,09 Triliun Rupiah atau 1,05 persen.

Pada tahun 2020, pendapatan daerah mencapai 1,81 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,27 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 terdapat refocusing terhadap target pendapatan daerah menjadi Rp. 1.71 Trilyun Rupiah, dan pada saat Perubahan APBD target pendapatan daerah menjadi Rp. 1.76 Trilyun Rupiah. Dan pada tahun 2021, target atas pendapatan daerah juga mengalami perubahan menjadi 2,27 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan pendapatan daerah menjadi Indikator Kinerja Utama karena pendapatan daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga merupakan kinerja keuangan daerah.

Dalam Pendapatan Daerah terdapat tiga unsur pendukung yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ketiga unsur dimaksud sangat mempengaruhi tercapai tidaknya target pendapatan Daerah. Pada tahun 2021, dari ketiga unsur tersebut hanya terdapat dua unsur pendapatan Daerah yang mencapai target pendapatan sehingga realisasi capaian terhadap pendapatan Daerah yang telah ditargetkan belum tercapai 100 persen. Unsur PAD mencapai target sebesar 86,78 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai realisasi sebesar 93,57 persen dan untuk pendapatan transfer mencapai target sebesar 98,70 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 157,64 persen. Penyumbang realisasi terbesar di komponen PAD yakni pendapatan pajak daerah yakni sebesar 116,29 persen. Sementara itu, pertumbuhan target dan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.1.5
 Prosentase Pertumbuhan Target Pendapatan Daerah
 Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Grafik 3.1.6
 Prosentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
 Tahun 2018-2021

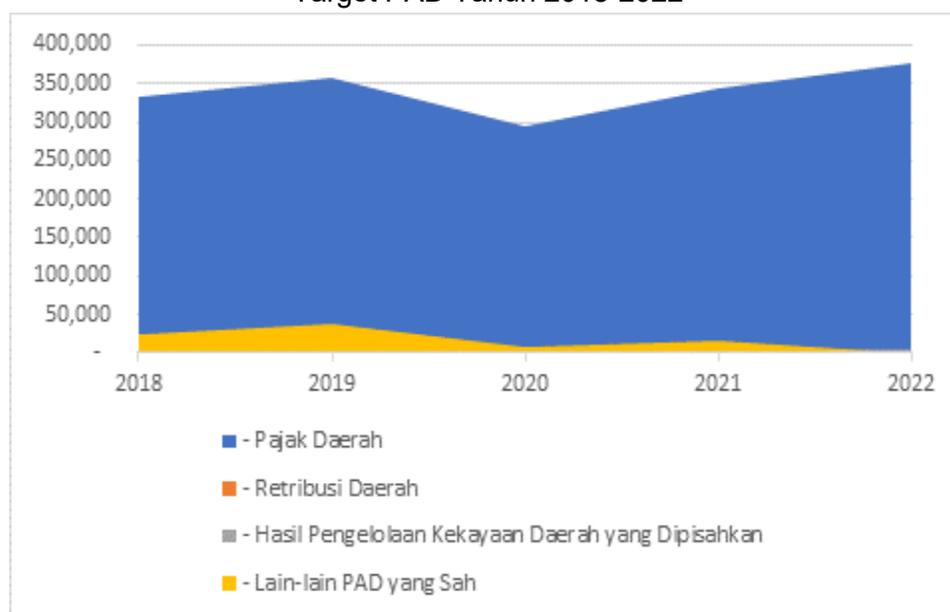


Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Rendahnya pertumbuhan pendapatan dipengaruhi oleh capaian rata – rata pertumbuhan target pendapatan pajak daerah yang tumbuh 3.57% dibanding periode RPJMD sebelumnya dengan pertumbuhan target pajak daerah sebesar 13.92%. Capaian rata – rata pertumbuhan realisasi pajak daerah Rp 372,4 milyar atau dengan rata – rata pertumbuhan realisasi pajak daerah 7.03%. Tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah terendah pada Tahun 2020 sebesar -9.09% dibanding tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2019 sebesar 10.55% namun mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi pajak daerah tahun 2021 (angka sementara) sebesar 13.49% atau naik sebesar 22.6%. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 turun sebagai dampak pandemi covid-19.

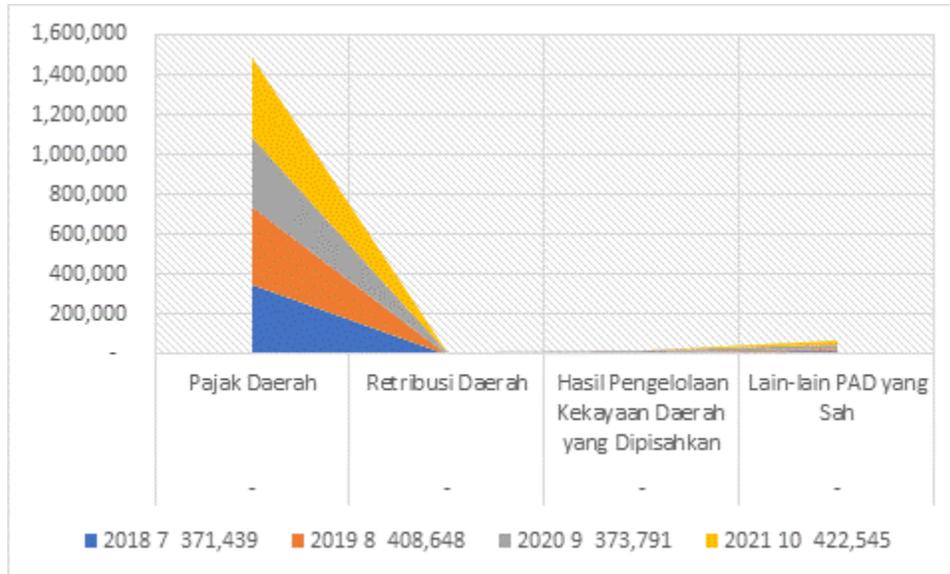
Untuk lebih jelas melihat pertumbuhan baik target, realisasi maupun prosentase dapat dilihat grafik dibawah ini;

Grafik 3.1.7
Target PAD Tahun 2018-2022



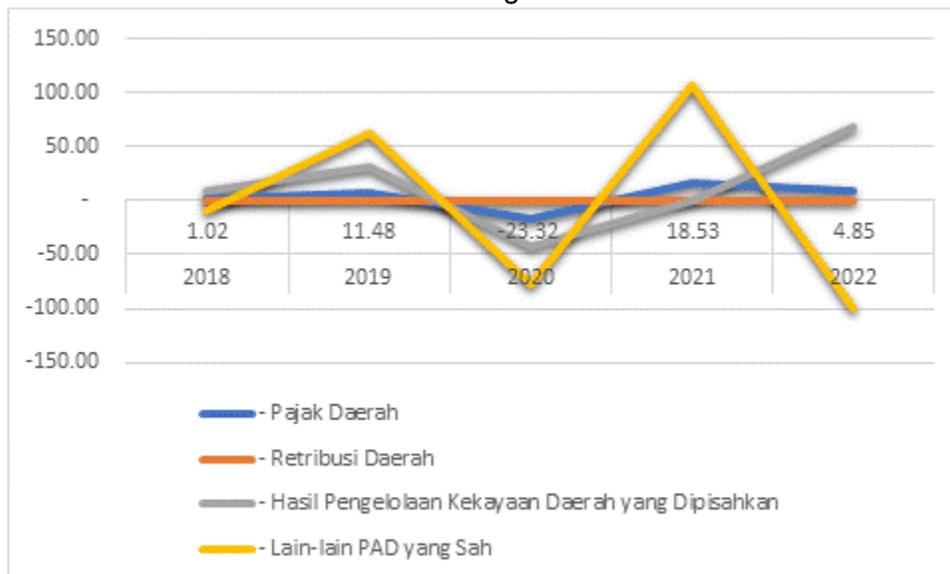
Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Grafik 3.1.8
Realisasi PAD Tahun 2018-2021



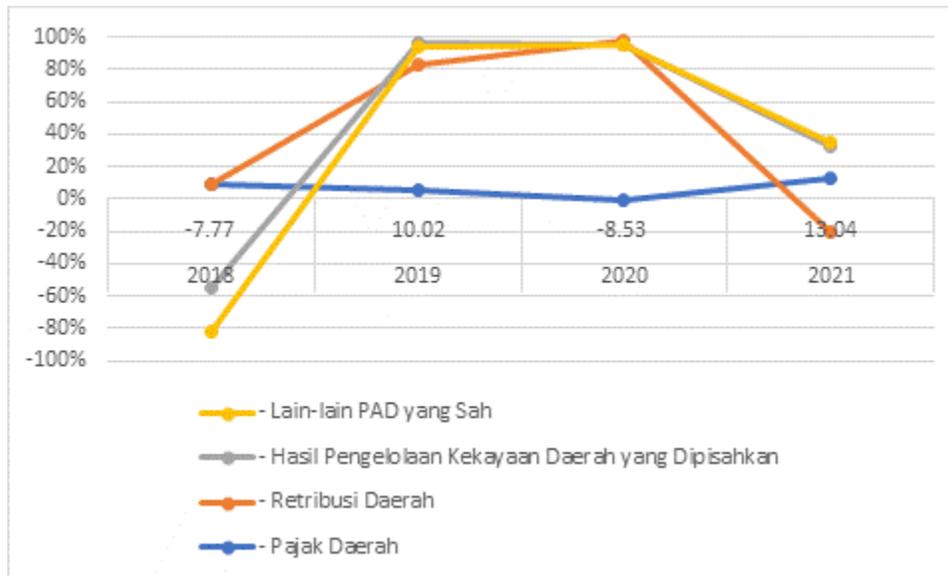
Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Grafik 3.1.9
Prosentase Pertumbuhan Target PAD Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Grafik 3.1.10
 Prosentase Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan pendapatan Daerah adalah dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah. Dengan program ini, diharapkan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pajak daerah, melainkan dari sumber-sumber pendapatan lain. Kebijakan yang ditempuh lainnya adalah kebijakan dalam bentuk peraturan Gubernur tentang penghapusan denda denda pajak kendaraan bermotor serta kebijakan untuk penggunaan e-samsat yang terbukti dapat memberikan sumbangan peningkatan pendapatan dan menjadi sumber pendapatan yang relative tinggi di tahun 2021.

Selanjutnya akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja IKU untuk sasaran kinerja "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan" Provinsi Gorontalo dengan capaian Nasional, sebagaimana pada tabel 3.1.11 berikut ini :

Tabel 3.1.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	1	Pertumbuhan Ekonomi	2,41%	3,69%	-
		2	Indeks Gini	0,409	0,381	-
		3	PDRB Perkapita	37,46	4.519,5	-
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01%	6,49%	+

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA AKSES DAN
KUALITAS PENDIDIKAN**

Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,01	68,49	68,68	68,45	69,00	100,80	69,62	99,11

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.1.12 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 69,00 atau capaian sebesar 100,80 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 68,45. Dari tabel diatas juga dapat dilihat kemajuan IPM Provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2018 sebesar 67,01. Pada tahun 2019 realisasi kinerja pada indikator ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target kinerja makro yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama, mencapai realisasi sebesar 68,49 dari target kinerja sebesar 67,93 atau realisasi sebesar 100,82 persen. Capaian tahun 2020 sebesar 68,68 dari target kinerja sebesar 68,71 atau sebesar 99,96 persen. Meskipun tidak mencapai target yang

telah ditetapkan dalam RPJMD, tapi capaian kinerja tahun 2020 meningkat sebesar 0,19 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 13,11 tahun. Angka ini meningkat 0,03 tahun disbanding tahun 2020 yang mencapai 13,08 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,08 tahun, dari 7,82 tahun menjadi 7,90 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,19 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Status pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo mencapai level "sedang". IPM Gorontalo pada tahun 2019 tumbuh sebesar 1,15 persen dan pada tahun 2020 IPM Gorontalo tumbuh sebesar 0,28 persen, sementara pada tahun 2021 IPM Gorontalo tumbuh sebesar 0,47 persen. Pertumbuhan IPM Gorontalo di tahun 2020 merupakan pertumbuhan paling rendah dalam satu dekade terakhir. Selama 2011-2020, IPM Gorontalo mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen.

Dibawah ini akan digambarkan IPM Provinsi Gorontalo beserta komponennya selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.1.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo
beserta komponennya

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,13	67,45	67,45	68,07	68,19
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	13,03	13,06	13,08	13,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,12	7,46	8,11	7,82	7,90
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	9.175	9.839	10,075	10,020	10,157
IPM		65,86	66,29	68,49	68,68	69,00
Pertumbuhan IPM	%	1,09	1,04	1,15	0,28	0,47

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode, sedangkan status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode yang di namai dengan level Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$) dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Provinsi Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Gorontalo adalah 66,41 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 68,19 tahun.

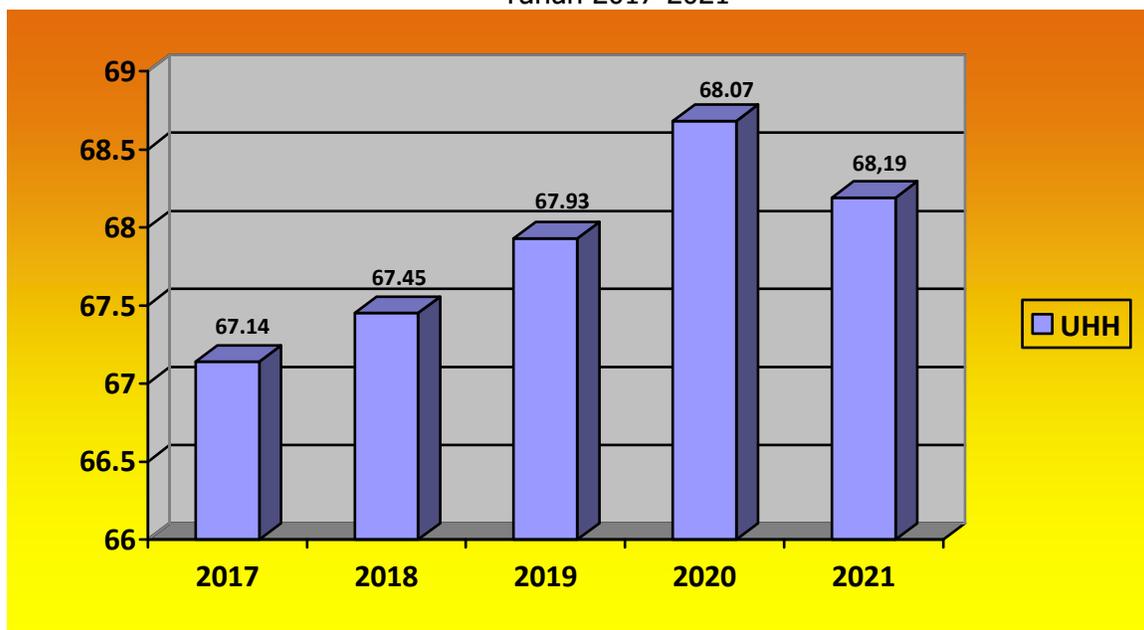
Untuk terus mengawal dan terus mendukung pencapaian kinerja peningkatan UHH ini, dilakukan upaya-upaya melalui pelaksanaan program-program kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Program penguatan intervensi stunting;
- Program kesehatan masyarakat;

- Program pelayanan kesehatan dan JKN;
- Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan UHH Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Gambar 3.1.14
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Usia Harapan Hidup, selain sebagai salah satu komponen dalam penetapan indeks pembangunan manusia, usia harapan hidup juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program bidang kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya.

Dimensi Pengetahuan

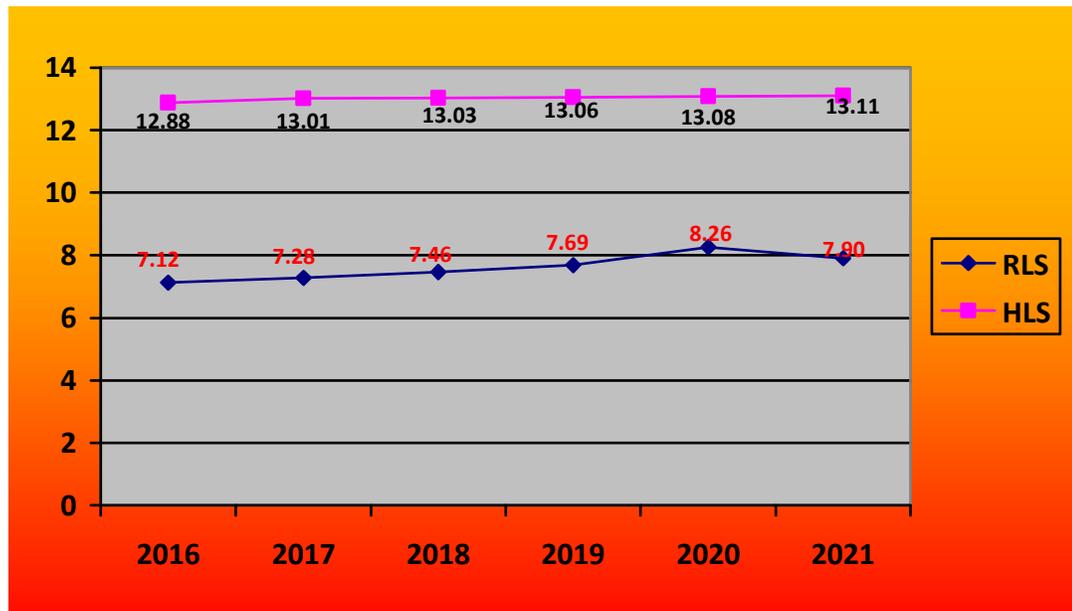
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Program pendidikan untuk rakyat merupakan salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi sekolah sehingga dapat meningkatkan harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo. Begitu pula program pemerintah lainnya yaitu Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

- Menuntaskan Gorontalo bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;
- Melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- Memberikan pendidikan gratis, meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Selama periode 2010 hingga 2021, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo telah meningkat sebesar 1,52 persen per tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 1,31 persen per tahun. Dibandingkan dengan periode 2010 hingga 2019, harapan lama sekolah Gorontalo secara rata-rata tumbuh sebesar 1,81 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo telah mencapai 13,06 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Dan pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 0,15 persen dengan harapan lama sekolah mencapai 13,08. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di tahun 2020 di Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 1,69 persen dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,26. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Provinsi Gorontalo yang lebih baik.

Dibawah ini akan digambarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Gambar 3.1.15
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dimensi Standar Hidup Layak

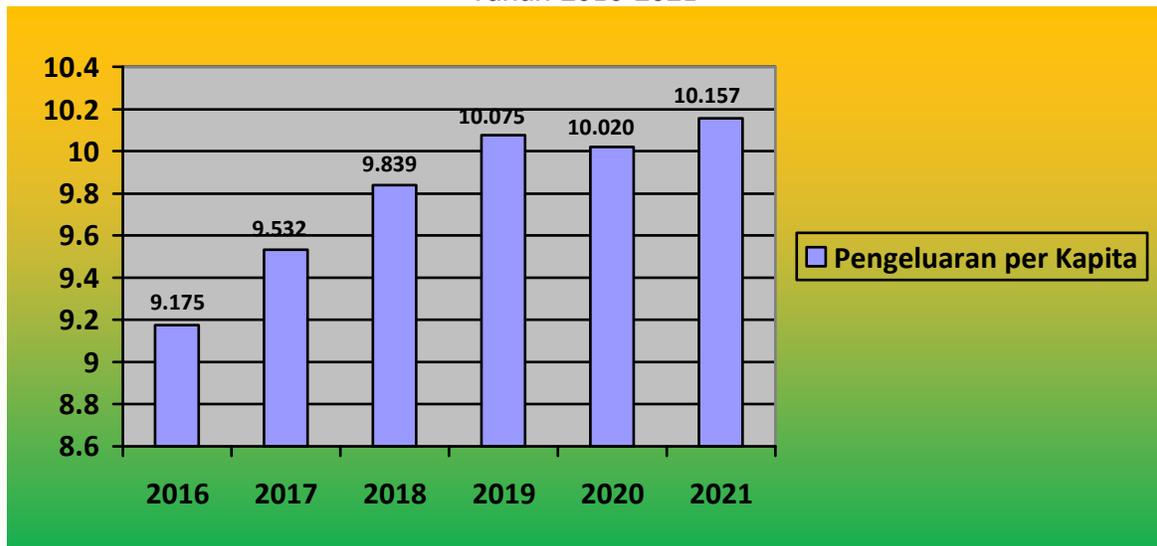
Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo mencapai Rp. 10,16 juta per tahun. Angka ini meningkat 1,37 persen disbanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi covid-19 melanda, pengeluaran riil per kapita mulai

meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Provinsi Gorontalo mencapai Rp. 10,07 juta per tahun. Selama Sembilan tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 2,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan di Provinsi Gorontalo sebesar 10,020 ribu rupiah. Pengeluaran per kapita tahun 2020 turun sebesar Rp. 55.000 atau -0,55 persen. Penurunan nilai pengeluaran per kapita masyarakat tersebut diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Hal itu menjadi salah satu pemicu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang hanya sebesar 68,68 atau hanya tumbuh 0,28 persen, dimana pertumbuhan tahun ini merupakan pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada pengeluaran per kapitapun turun.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan pengeluaran per kapita per Tahun di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Gambar 3.1.16
Pengeluaran per Kapita per Tahun di Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

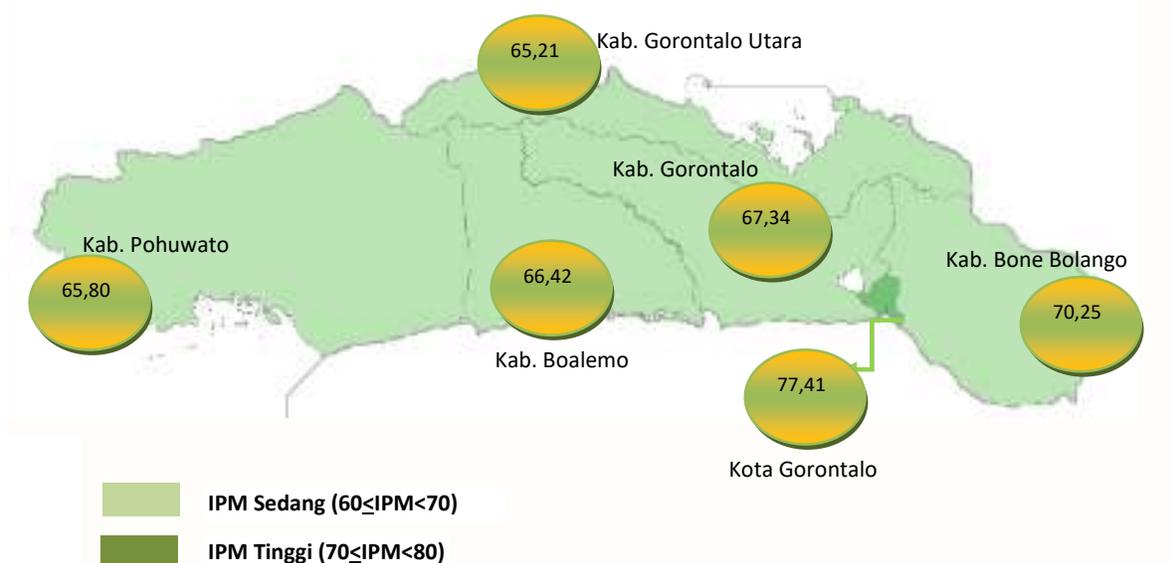
Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kab/Kota cukup bervariasi. IPM pada level Kab/Kota berkisar antara 65,21 (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 77,41 (Kota Gorontalo). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,30 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 72,53 tahun (Kota Gorontalo). Sementara pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar antara 12,38 tahun (Kabupaten Pohuwato) hingga 14,50 tahun (Kota Gorontalo), serta rata-rata lama sekolah berkisar antara 7,00 tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 10,37 tahun (Kota Gorontalo), pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat Kab/Kota berkisar antara 8,94 juta rupiah per tahun (Kabupaten Boalemo) hingga 12,39 juta rupiah per tahun (Kota Gorontalo). Kabupaten Bone Bolango mengalami perubahan status dari sedang menjadi tinggi di tahun 2021, sehingga status pembangunan manusia di tingkat Kab/Kota menjadi 4 kabupaten yang berstatus “sedang” dan 2 wilayah (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) yang berstatus “tinggi” pada tahun 2021.

Peningkatan IPM provinsi juga tercermin pada level Kab/Kota. Selama periode 2020 hingga 2021, seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Boalemo dengan 0,77 persen dan Kabupaten Pohuwato dengan 0,66 persen. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, dimana pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo juga cukup bervariasi. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat dua Kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 1,38 persen dan Kabupaten Pohuwato sebesar 1,29 persen. Dan pada periode 2019-2020, terdapat tiga kabupaten dengan pertumbuhan IPM tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen, diikuti Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertumbuhan sebesar 0,53 persen serta Kabupaten Bone Bolango sebesar 0,50 persen.

Selanjutnya akan digambarkan capaian dan status pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 3.1.17
Capaian dan Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Selanjutnya, pada tabel 3.1.18 di bawah ini akan digambarkan perbandingan antara IPM Provinsi Gorontalo dan capaian IPM Nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	72,29	-

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Tujuan 3 : Penurunan Angka Kemiskinan

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya adalah Peningkatan Penurunan Angka Kemiskinan. Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Angka Kemiskinan. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :
MENURUNNYA TINGKAT
KEMISKINAN**

Tabel 3.1.19
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Angka Kemiskinan	15,83%	15,31%	15,59%	15,05%	15,41%	97,61	14,69%	14,64

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.1.19 diatas dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 15,41 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 15,59 persen angka kemiskinan di tahun 2021 ini turun sebesar 0,18 poin.

Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator kinerja dalam rangka mengidentifikasi atau mengetahui sejauh mana program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat mampu mengentaskan/menanggulangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya akan digambarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam tabel 3.1.20 sebagai berikut :

Tabel 3.1.20
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Rincian	Indikator	
	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	4,06	21,51
Perdesaan	24,38	163,09
Jumlah	15,41	184,60

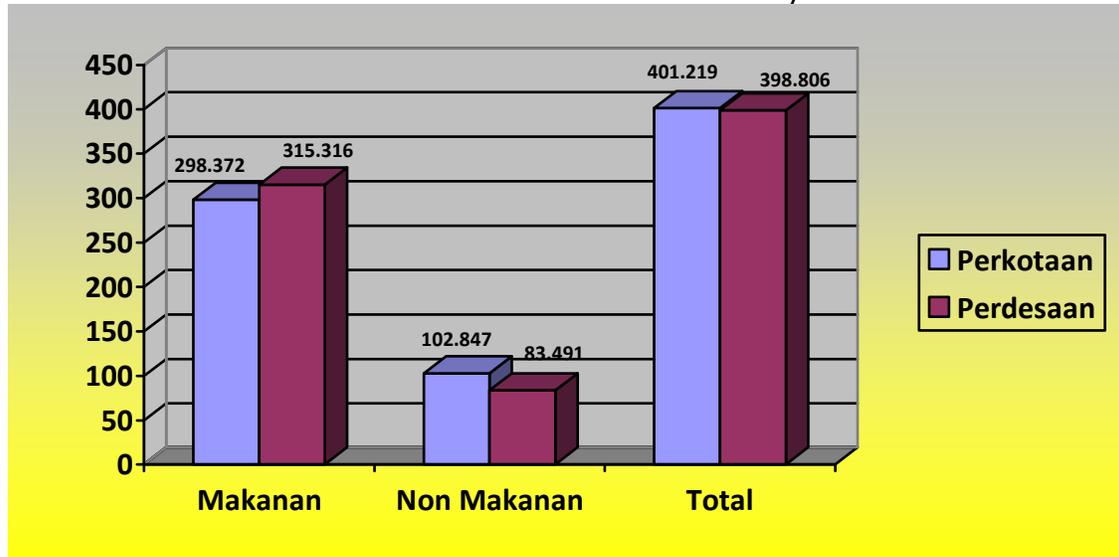
Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.1.20 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yaitu sebanyak 163,09 ribu jiwa atau sebesar 24,38 persen. Sedangkan di daerah perkotaan, penduduk miskin hanya sebesar 4,06 persen atau sebanyak 21,51 ribu jiwa. Dari gambaran diatas juga dapat dilihat besaran persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2021 sebesar 15,41 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 184,60 ribu jiwa. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,71 ribu orang atau menurun sebesar 0,18 persen poin.

Dalam menentukan kategori kemiskinan atau miskin, tak lepas dari unsur garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan sangat menentukan besar kecil jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang disebut garis kemiskinan non makanan.

Dibawah ini akan digambarkan garis kemiskinan di wilayah provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 3.1.21
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Terhadap permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, telah dilakukan berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Program yang dianggap paling tepat yang mampu menurunkan kemiskinan adalah bantuan pangan, semisal Rastha dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik nasional maupun daerah. Program ini dianggap paling tepat mengingat lebih dari 75 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk pangan. Demikian halnya dengan bantuan non-pangan (Mahyani, subsidi Listrik, Pendidikan, Kesehatan, termasuk Angkutan/Transportasi berupa Bus Sekolah Gratis) yang berkontribusi 12-16 persen terhadap garis kemiskinan (GK). Serta upaya-upaya lainnya masih terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo agar program dapat memberikan dampak lebih optimal. Yang tak kalah penting adalah kampanye "Tidak/Berhenti Merokok" terus didorong dan digalakkan, sehingga pengeluaran rokok bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat/produktif.

Selain itu, menurunkan kemiskinan ditempuh dengan berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai langkah awal adalah pendataan terhadap penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM, pemenuhan

kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberian layanan kesehatan gratis, upaya meningkatkan perlindungan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan akan dicapai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, pemberian bantuan peralatan penangkap ikan dan pembudidaya ikan serta Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok nelayan baik pembudidaya maupun nelayan tangkap, juga bantuan ternak terhadap kelompok-kelompok peternak.

Selain itu, upaya-upaya lain adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok karena program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin / keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Selain itu, program – program seperti Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan Asuransi miskin juga dilaksanakan dan ditingkatkan. Selain program-program nasional penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo pun telah melaksanakan program-program unggulan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Program penanganan daerah rawan pangan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dalam pencapaian kinerja kios akses pangan sampai dengan tahun 2021 sejumlah 44 lembaga keuangan desa (93 kios akses pangan).
2. Program penanganan daerah rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berupa paket-paket bahan pokok di daerah rawan pangan.
3. Program Kawasan Permukiman, yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Pemberian Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR);
4. Program perlindungan dan jaminan sosial (bantuan sosial kesejahteraan keluarga);

5. Program pemberdayaan sosial (bimbingan dan motivasi sosial serta peningkatan kapasitas penerima bantuan sosial);
6. Program rehabilitasi sosial (penyaluran bantuan kepada kelompok marginal dan rentan seperti penyandang disabilitas, tuna sosial dan lanjut usia);
7. Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Program Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan;
9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). Bantuan Bahan Produksi bagi UMK setelah memperoleh Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) berupa bahan produksi.
11. Program Pengembangan UMKM.
 - a. Pembinaan UKM Naik Kelas kepada 50 UKM dari kabupaten kota se Provinsi Gorontalo.
 - b. Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM oleh 75 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
 - c. Promosi Produk UKM oleh 50 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
 - d. Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas berupa Bahan produksi.
 - e. Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM.
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yaitu Penumbuhan IKM melalui pembinaan.
13. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat didaerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam

- kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya;
14. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan. Beberapa yang dilakukan intervensi yang disalurkan kepada pelaku usaha perikanan berupa bantuan sarana perikanan tangkap pada tahun 2021 sebanyak 43 unit perahu 3 GT bermesin tempel 15 PK (setiap unit perahu untuk 2 orang penerima). Sehingga total pelaku usaha perikanan yang menerima intervensi bantuan perahu 3 GT bermesin tempel 15 PK sebanyak 86 orang yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
 15. Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin, yaitu memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
 16. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian terhadap minat/bakat para tenaga kerja;
 17. Program pengelolaan aspek kegeologian yaitu bantuan sumur bor untuk masyarakat sulit air bersih;
 18. Program pengelolaan ketenagalistrikan yaitu bantuan listrik gratis terhadap masyarakat miskin.
 19. Program pengawasan sarana pertanian yaitu bantuan benih padi dan jagung, bantuan ternak sapi, ayam, kambing untuk kelompok masyarakat kurang ampu.
 20. Program penataan prasarana pertanian yaitu bantuan penyediaan alat-alat mesin pertanian gratis untuk masyarakat petani yang tidak mampu.
 21. Asuransi Usaha Tani Padi yang bertujuan untuk mengalihkan resiko akibat kegagalan panen yang dialami petani dan penggarap melalui skema pertanggung jawaban asuransi. Program/kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya untuk daerah yang masih memerlukan kerja keras dalam penanggulangan kemiskinan seperti di Provinsi Gorontalo. Sejak diterapkannya kebijakan ini, para petani pemilik lahan maupun penggarap tidak akan mengalami kerugian yang berkelanjutan ketika terjadi resiko akibat gagal panen yang selanjutnya

berdampak pada ketidakmampuan masyarakat petani memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ketentuan dalam program ini adalah:

1. Petani tergabung dalam Kelompok Tani.
2. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan sawah paling luas 2 Ha.
3. Petani penggarap (tidak memiliki lahan usahatani) dan menggarap lahan sawah paling luas 2 Ha.
4. Diutamakan petani yang mendapat bantuan Pemerintah dan yang ikut dan terdaftar dalam program asuransi.

Dengan jangka waktu pertanggung jawaban adalah Satu Musim Tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Sementara resiko yang dijamin adalah akibat bencana banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Meskipun telah banyak program-program penanganan kemiskinan pada tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, tetapi masih memerlukan kebijakan-kebijakan lain yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini dapat turun sebagaimana yang telah ditargetkan.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional yang pada tahun 2021 sebesar 9,71 persen, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif cukup tinggi. Di bawah ini akan digambarkan persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo dengan penduduk miskin Indonesia sebagai berikut :

Tabel 3.1.22
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	15,41 %	9,71 %	-

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN BERSIH**

Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	50,00	BB	50,00

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021

Pada tabel 3.1.23 diatas, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2018 hasil evaluasinya sebesar 61,36 dengan kategori "B". Capaian tahun 2019 Indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo adalah 63,36 dengan kategori "B". Indeks ini naik sebesar 2,00 poin dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Terdapat dua komponen yang dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) masih didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan

RB tahun 2020. Hasil evaluasi implementasi RB untuk tahun 2021, belum di umumkan oleh Kementerian PAN RB selaku evaluator pelaksanaan RB daerah Provinsi Gorontalo.

Dibawah ini akan diuraikan perolehan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi atas komponen pengungkit dan komponen hasil Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.24
 Nilai Komponen Pengungkit Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A.	Komponen Pengungkit		
	1. Pemenuhan	20,00	11,37
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,77
	3. Reform	30,00	13,65
Total Komponen Pengungkit		60,00	30,79
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,74
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,05
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,15
4	Kinerja Organisasi	10,00	6,63
Total Komponen Hasil		40,00	32,57
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	63,36

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021

Dari gambaran pada tabel 3.1.24 diatas dapat dilihat bahwa hasil yang di peroleh dari komponen pengungkit atas reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo di tahun 2020 mencapai 30,79 dari bobot sebesar 60,00 dan untuk komponen hasil dengan nilai 32,57 dari bobot 40,00 sehingga indeks RB sebesar 63,36 dari bobot sebesar 100,00. Itu berarti bahwa masih perlu banyak perbaikan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun selanjutnya.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan indeks hasil antara pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.25
Nilai Indeks Hasil Antara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	69,21
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30
3	Sistem Merit	0-400	238,5
4	Profesionalitas ASN	0-100	65
5	Maturitas SPIP	0-5	3,13
6	Kapabilitas APIP	0-5	3

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021

Selain komponen hasil dan komponen pengungkit yang menjadi obyek evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, survei internal dan eksternal juga merupakan komponen penting yang sangat menentukan dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang kemudian berpengaruh pada tinggi rendahnya pencapaian indeks reformasi birokrasi.

Penetapan indeks reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatnya zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan

tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Gambar 3.1.26
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi



Sumber : Kementerian PAN RB

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam *road map* reformasi birokrasi provinsi gorontalo 2018-2022. Sampai dengan akhir tahun 2020 hingga tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di

Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Tindak lanjut tersebut akan di gambarkan dalam perkembangan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sosialisasi dan membudayakan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua lini birokrasi baik tingkat daerah provinsi, Kab/Kota, perangkat daerah bahkan secara luas menginformasikan kepada masyarakat melalui dialog-dialog dan diskusi di media sosial maupun di media-media elektronik.



Keterangan: Dialog reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo di RRI

Perkembangan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menunjukkan beberapa kemajuan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berbenah dan tak henti-hentinya melakukan perbaikan terhadap pencapaian 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang antara lain adalah :

a. Manajemen Perubahan :

- Telah dibentuk Tim Reformasi Daerah dan di seluruh OPD yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan menggerakkan reformasi birokrasi baik di daerah maupun di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga percepatan implementasi reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia di tahun 2025 dapat

terwujud serta menjadikan isu reformasi birokrasi melembaga di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Telah menyusun Road Map reformasi birokrasi periode terakhir sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo.
- Penetapan dan membangun agen perubahan pada setiap perangkat daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik, sebagai penggerak perubahan, yang mendorong dan menggerakkan Pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan, sebagai pemberi solusi, yang memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan perangkat daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan serta sebagai mediator, yang membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar perangkat daerah dalam proses perubahan, sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungannya dengan para pengambil keputusan dan yang terakhir adalah sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
- Membangun budaya kerja untuk menegakkan integritas seluruh pegawai. Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang pertama melakukan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penguatan budaya kerja dan *employer branding* sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Sejak diluncurkannya *core values* BerAKHLAK oleh Presiden RI pada tanggal 27 Juli 2021, pemerintah Provinsi Gorontalo segera menindaklanjuti dengan berbagai reaksi nyata sebagai bentuk internalisasi *core values* 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa".



*Keterangan: Rakor Budaya Kerja bersama Wakil Gubernur dan Pimpinan OPD
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo*

- Sebagai apresiasi dari sigap dan cepatnya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merespon adanya budaya kerja baru ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo diundang menjadi narasumber pada diskusi terkait internalisasi budaya kerja BerAKHLAK di Provinsi Gorontalo melalui *podcast* Kementerian PANRB.



Keterangan: Pemerintah Provinsi Gorontalo (diwakili Karo Organisasi) dalam diskusi internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK pada podcast Kementerian PANRB di Jakarta

- Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang mengisi pameran penerapan budaya kerja BerAKHLAK dalam "ASN Culture Fest 2021". Setelah enam bulan berjalan, progres penerapan nilai-nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa di instansi pemerintah diperlihatkan dalam ASN Culture Fest 2021. Dengan konsep *virtual exhibition*, ajang ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya penguatan budaya kerja dan bersama-sama menggerakkan semangat penerapan *core values* BerAKHLAK di setiap unit kerja. ASN Culture Fest yang digelar penghujung tahun 2021 adalah ajang untuk membagi pengalaman dari beberapa instansi pemerintah di dalam konteks bagaimana mereka melakukan internalisasi *core values* BerAKHLAK dan *employer branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa.

b. Penguatan sistem pengawasan :

- Membangun zona integritas.
- Dilakukan pengendalian gratifikasi.
- Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah.
- Pengawasan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
- Penanganan pengaduan Masyarakat.
- Penanganan *whistle blowing system* di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower system*) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Penanganan benturan kepentingan ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 72 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- Pada tahun 2021, dalam upaya meningkatkan komitmen pimpinan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo

menyelenggarakan kegiatan SAKIP Award-Penghargaan Pemimpin Perubahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bagian penting dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan penyelenggaraan SAKIP yang baik maka perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan, pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor, serta manajemen keuangan dan manajemen kinerja dapat diselaraskan dan diintegrasikan (penganggaran berbasis kinerja). SAKIP yang baik akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mendorong komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan dan implementasi SAKIP yang baik di setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan SAKIP AWARD, Penghargaan Pemimpin Perubahan Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2021. Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi bagi Pimpinan OPD yang memiliki komitmen dan *achievement* dalam percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pengelolaan SAKIP pada OPD masing-masing baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.



Keterangan: Pemenang SAKIP Award-Penghargaan Pemimpin Perubahan Provinsi dan Kab/Kota bersama para Pimpinan Daerah

- Telah dilakukan sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah.
- Telah dilakukan sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dengan organisasi perangkat daerah.
- Menyusun laporan kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah secara terbuka serta telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas dan pejabat fungsional.
- Penilaian kinerja individu telah dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan penilaian kinerja individu melalui penggunaan aplikasi siransija (sistem pengukuran prestasi kerja) sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur gorontalo nomor 08 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 50 tahun 2016 tentang sistem pengukuran prestasi kerja aparatur sipil negara berbasis revolusi mental di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo.
- Telah membangun system informasi kinerja pemerintah berbasis elektronik yang bisa diakses oleh semua pejabat, pegawai dan stakeholders.
- Mulai membangun aplikasi yang terintegrasi mulai dari pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

d. Penguatan kelembagaan :

- Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi memperoleh penghargaan atas penataan kelembagaan berupa Kematangan Organisasi yang memperoleh predikat "Sangat Tinggi".
- Telah dilakukan penataan kembali tugas dan fungsi perangkat daerah Provinsi Gorontalo, sehingga dapat dipetakan susunan organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal pokok yang dipertimbangkan adalah menghindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas antara perangkat daerah, memiliki rentang kendali yang proporsional bersifat jejaring (*Networking*), serta memperhatikan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas perumpun antar perangkat daerah.

- Telah dilakukan penguatan pada analisis beban kerja pada setiap petangkat daerah yang telah disusun agar dapat diketahui uraian tugas yang akan dilaksanakan pada setiap perangkat daerah tersebut.
- Telah dilakukan upaya penguatan unit kerja pelayanan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya unit kerja yang menangani pelayanan publik.
- Telah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 tahun 2019 tentang Langkah Startegis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional serta beberapa surat Menteri Dalam Negeri terkait Penyederhaan Birokrasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan langkah strategis dan konkrit Penyederhanaan Birokrasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: a). Identifikasi dan Pemetaan terhadap jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional (dengan surat no. 060/Organisasi/1237/2021 dan penyampaian ke Kemendagri dengan surat no. 060/Organisasi/1279/2021). b). Penyederhanaan Struktur Organisasi (surat no. 060/Organisasi/719, tgl 24 Juni 2021 dan surat no. 061/5869/OTDA, tgl. 10 Sept. 2021, Hal. Persetujuan Penyederhanaan Struktur OPD di likungan Pemda Prov. Gorontalo).
- Melakukan penyetaraan jabatan dengan tahapan sebagai berikut: a). Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (surat no. 060/Organisasi/2619, tgl. 08 Sept. 2021) (Prov. Gorontalo adalah provinsi yg pertama kali menyampaikan usulan penyetaraan jabatan dan usulan perubahan perkada tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemprov. Gorontalo). b). Persetujuan Penyetaraan Jabatan (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8129/OTDA, tgl. 9 Desember 2021 perihal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo). c). Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 800/8599/OTDA, Tgl. 27 Desember 2021, Perihal: Klarifikasi dan Perubahan Lampiran Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. d). Pelantikan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 282 pejabat. Pelantikan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021, dilaksanakan secara tatap muka dan virtual oleh Wakil Gubernur Gorontalo.

PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN JABATAN

- 1. Pelantikan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berjumlah 282 pejabat. Pelantikan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021, dilaksanakan secara tatap muka dan virtual oleh Wakil Gubernur Gorontalo.**



- e. Penguatan Tatalaksana :
 - Telah dilakukan pengembangan penataan standar operasional prosedur.
 - Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government*.
 - Pelaksanaan keterbukaan informasi public.
 - Penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik.
 - Melakukan penguatan sistem kearsipan kepada seluruh OPD.
 - Mulai menata kembali pola tata laksana yang ada (*business process redesign*).
- f. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur sispil Negara.
 - Telah ditetapkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan.
 - Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Sudah menerapkan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, melakukan *assessment* pegawai dan uji kompetensi pegawai serta telah dibangun sistem informasi kepegawaian.
- g. Penguatan peraturan perundang-undangan:
- Telah dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lepentingan umum dan kesusilaan.
 - Telah dilakukan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - Melalui proses penataan peraturan perundang-undangan, maka dipetakan 3 (tiga) hal pokok, yakni ;
 1. peraturan perundang-undangan yang akan dibatalkan (*Deregulasi*), karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
 2. peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan kembali (*reregulasi*) sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
 3. peraturan perundang-undangan baru yang harus dibentuk sebagai tindaklanjut dari amanat undang-undang yang lebih tinggi atau dalam rangka merespon tantangan dan dinamika lingkungan eksternal strategis yang berpengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - Meningkatkan penerapan sistem dokumentasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik:
- Telah dibentuk unit layanan administrasi pada unuit-unit pelayanan kepada masyarakat yang dibarengi dengan pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat

pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima serta pengelolaan pengaduan pelayanan public.

- Telah dilakukan penilaian terhadap pelayanan public.
- Telah dilakukan pembangunan, pengembangan dan komunikasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik Provinsi Gorontalo, ditandai dengan telah diperolehnya penghargaan kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia dimana Pemerintah Provinsi gorontalo masuk dalam zona hijau.
- Meningkatkan inovasi pelayanan publik dengan membuat instruksi gubernur gorontalo tentang *one agency one innovation* yang bertujuan untuk mendorong setiap perangkat daerah dapat menciptakan inovasi yang baru maupun inovasi yang direplikasi atau dimodifikasi serta melakukan kerjasama dengan lembaga internasional (giz/ngo).
- Meningkatkan pelayanan publik dengan menindaklanjuti tingkat kepuasan masyarakat atau keluhan yang dihadapi masyarakat atas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pada intinya bahwa, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan pembenahan-pembenahan dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mulai membangun *e-government* mulai dari sistem perencanaan daerah sampai dengan penganggaran dan pelaporan dan evaluasi. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui pencapaian reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan kategori nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.27
 Kategori dan Nilai Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Di Wilayah Gorontalo Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
1	Provinsi Gorontalo	63,36	B
2	Kota Gorontalo	62,95	B
3	Kab. Gorontalo	61,60	B
4	Kab. Boalemo	53,79	CC
5	Kab. Pohuwato	60,14	B
6	Kab. Bone Bolango	56,63	CC
7	Kab. Gorontalo Utara	19,87	D

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG IKU TAHUN 2021

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menetapkan indikator kinerja pendukung pencapaian kinerja IKU. Indikator kinerja pendukung IKU ini juga telah diperjanjikan oleh Gubernur sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang melayani.

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Pendukung IKU
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1	Wisatawan Mancanegara (orang)	7,559	65	0,86
			2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	722,879	484,580	67,03
2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	3	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	13.813,97 milyar	10.665,33 milyar	77,21
			4	Skor PPH Ketersediaan	66,6	76,66	115,10
		5	Skor PPH Konsumsi	84,4	75,5	89,45	
		6	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	101,7	96,92	95,00	
		7	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	104,12	105,68	101,50	

3	Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	8	Indeks Resiko Bencana	0,37	0,43	83,78	
			9	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	1.000 Ha	120,7 Ha	12,07	
4	Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	10	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	267,52 km	373,42 km	139,59	
			11	Indeks E-Government	3,83	2,51	65,53	
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	12	Laju Inflasi	3,42 %	2,59 %	124,27	
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	13	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,63 %	77,75 %	100,15	
			14	Angka Melek Huruf	99,98%	99,89%	99,91	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	15	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,45	2,36	103,67	
			Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	16	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	3 jenis	7 jenis	233,33
				17	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,24	0,23	95,83
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	18	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	81,00 %	81,35 %	100,43	
			19	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	67,71 %	81,25 %	119,99	
		20	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20 %	22 %	110,00		

Sumber Data : Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertanggungjawab terhadap program pendukung IKU Daerah tahun 2022

Selanjutnya, akan dipaparkan tentang capaian kinerja terhadap indikator kinerja pendukung IKU yang dimulai dari tujuan, sasaran strategis dan capaian indikator kinerja sebagai berikut :



Tujuan 1 : Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional

Tujuan Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional yang dijabarkan dalam sasaran strategis Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara akan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap

indikator kinerja untuk tujuan pertama ini sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA WISATAWAN
NUSANTARA DAN MANCANEGERA**

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara.

Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wisatawan Mancanegara	8.532 orang	11.173 orang	2.112 orang	7.559 orang	65 orang	0,86	7.937 orang	0,78
2	Wisatawan Nusantara	957.802 kunjungan	1.304.256 kunjungan	510.421 orang	722.879 orang	484.580 orang	67,03	759.023 kunjungan	63,84

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 mengalami penurunan signifikan. Capaian di tahun 2021 ini masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 masih relatif sama. Dampak yang paling dirasakan dengan adanya pandemi covid-19 ini adalah sektor pariwisata, dimana sektor pariwisatalah yang paling merasakan dampaknya. Dalam penyelenggaraan urusan bidang pariwisata, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kinerja Provinsi Gorontalo antara lain yaitu jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara hanya mencapai 65 orang di tahun 2021 sedangkan di tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu 2.112 kunjungan. Untuk wisatawan Nusantara kunjungan wisatawan di tahun 2020 sebesar 484.580 orang wisatawan turun sebesar 5,33 persen dibandingkan dengan kunjungan wisatawan di tahun 2020 yang mencapai 510.421 kunjungan. Target untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2021 ini adalah 1,87 hari. Dibandingkan dengan tahun 2020, dimana target rata-rata lama tinggal selama 3 (hari) hari, namun realisasi hanya mencapai 1,55 hari dengan persentase sebesar 51.66 persen. Ditahun 2021, sedikit lebih tinggi dengan 59,11 persen.

Penurunan ini dikarenakan merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat didunia. Hampir seluruh sektor terdampak, sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-19 ini. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini.

Berbagai kebijakan sektor pariwisata di tengah pandemik covid-19 mulai di terapkan di Provinsi Gorontalo. Misalnya di Kabupaten Gorontalo Utara, dimana saat ini terdapat destinasi wisata baru yang sangat diminati bahkan menjadi primadona masyarakat Gorontalo bahkan dari luar Gorontalo yaitu Pantai Minanga. Tingginya antusias pengunjung terhadap obyek wisata tersebut terutama di hari libur, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pariwisata di tengah

pandemi yaitu dengan mengusung konsep wisata tangguh, yang bermakna tangguh dari berbagai hal, termasuk tangguh dengan kondisi melawan pandemi Covid-19. Dengan konsep tersebut diharapkan geliat pariwisata di Kabupaten tersebut mulai pulih dan destinasi wisata pantai Minanga akan menjadi percontohan dalam penerapan protokol kesehatan dalam berwisata. Konsep tersebutpun telah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait yaitu pihak Polres setempat dan DPRD untuk mendorong kemajuan pariwisata yang tentu berdampak pada perekonomian masyarakat.

Sektor pariwisata menjadi satu dari delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya dan kebijakanpun telah ditempuh untuk menumbuhkan kembali pariwisata, diantaranya adalah mengusulkan sejumlah destinasi wisata sebagai destinasi geopark serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa lokasi wisata. Dan yang tak kalah pentingnya adalah promosi pariwisata secara masif sehingga sector pariwisata ini mampu bertahan ditengah pandemi.

Di Provinsi Gorontalo terdapat banyak destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Obyek wisata yang sangat populer di Provinsi Gorontalo yang merupakan unggulan masing-masing daerah Kabupaten/Kota antara lain adalah sebagai berikut:

- Obyek wisata unggulan Kota Gorontalo.

Gambar 3.2.2
Salah Satu Obyek Wisata Unggulan Kota Gorontalo



Obyek Wisata Benteng Otanaha

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Gorontalo :

Gambar 3.2.3
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Gorontalo



Obyek Wisata Alam Bubohe



Obyek Wisata Pentadio Resort

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Bone Bolango :

Gambar 3.2.4
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Bone Bolango



Obyek Wisata Taman Laut Olele

Obyek Wisata Hiu Paus

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Boalemo :

Gambar 3.2.5
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Boalemo



Obyek Wisata Pulo Cinta

Obyek Wisata Desa Bajo

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Pohuwato :

Gambar 3.2.6
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Pohuwato



Wisata Pantai Pohon Cinta



Obyek Wisata Torosiaje

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Gorontalo Utara :

Gambar 3.2.7
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Gorontalo Utara



Wisata Pantai Saronde



Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pariwisata Gorontalo mungkin masih sangat kecil baik dari segi ragam destinasi wisata maupun jumlah kunjungan wisatanya. Oleh karenanya, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Gorontalo saat ini saling bersinergi dan sangat gencar dalam mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo dengan tentunya didukung pula oleh perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana obyek wisata serta SDM kepariwisataan, yang diharapkan nantinya berdampak pada lama tinggal wisatawan di Gorontalo dan tak kalah penting adalah guna mendukung tujuan pemerintah yaitu Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional dan Internasional dengan slogan "Pariwisata Gorontalo mendunia".

Selanjutnya dibawah ini akan digambarkan dalam tabel perbandingan realisasi Provinsi Gorontalo dengan capaian Nasional tahun 2021.

Tabel 3.2.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara	65 kunjungan	1.557.530 kunjungan	-
		Wisatawan Nusantara	484.580 kunjungan	-	-

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pada tabel 3.2.8 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 1,56 juta kunjungan di tahun 2021. Kondisi tersebut menurun 61,57 persen dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2020 yang berjumlah 4,05 juta kunjungan. Sementara rata-rata lama tinggal atau menginap di Indonesia berkisar antara 3,24 hari dan 1,59 hari.



Tujuan 2 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat yang akan dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan akan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR
PERTANIAN/PERKEBUNAN
TERHADAP PDRB**

Yang pertama, Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	14.588,74 milyar	16.021,90 milyar	16.190,93 milyar	13.813,97 milyar	10.665,33 milyar	77,21	14.228,39 Milyar	74,96

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.8 dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB realisasi kinerja mencapai 77,21, dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 120,72 persen, kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2021 turun sebesar 0.90 persen. Pada tabel 3.2.8 juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 relatif tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021 ini. Pada tahun 2018, dimana target yang ditetapkan terhadap kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada PDRB di Provinsi Gorontalo sebesar 12.641,74 milyar dengan realisasi sebesar 14.588,74 milyar atau sebesar 115,40 persen. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada PDRB tahun 2019 sebesar 16.021,90 milyar dari target yang ditetapkan sebesar 13.020,99 milyar atau capaian sebesar 123,05 persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh tiga kategori yang diantaranya adalah sector pertanian dan perkebunan. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2021, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,66 persen. Meskipun demikian, berbagai factor penghambat pencapaian target kinerja sector pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB, pastilah ada kendala dan hambatan utamanya di tengah pandemic covid-19 saat ini.

Pada tabel 3.2.10 dibawah ini akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	10.665,33 milyar	2.253,8 triliun	-

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pencapaian tujuan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat didukung pula oleh pencapaian sasaran strategis ini.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN
KONSUMSI PANGAN YANG BERSUMBER
DARI PERTANIAN DAN KELAUTAN
PERIKANAN YANG BERPANGKAP PADA
KESEJAHTERAAN PETANI/NELAYAN**

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Skor PPH Ketersediaan, Skor PPH Konsumsi, Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP) dan indikator kinerja Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8	8
1	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya (NTNP)	107,2	101,37	93,35	101,7	96,92	95,00	102,1	91,43
2	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	101,59	101,88	104,13	104,12	105,68	101,50	104,42	99,72
3	Skor PPH Ketersediaan	65,65	69,23	84,74	66,6	76,66	115,10	66,89	126,69
4	Skor PPH Konsumsi	88,8	89,3	90,70	84,4	75,5	89,45	86	105,46

Sumber Data : BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Tahun 2022

Dari tabel 3.2.9 diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis ini dapat dicapai dengan sangat baik yang ditandai dengan warna "Hijau Tua". Hal ini dapat dilihat dari capaian keempat indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, memperoleh penilaian rata-rata capaian 100,02 persen.

Nilai Tukar Nelayan (NTN dan NTP) merupakan salah satu indikator kinerja utama sektor Kelautan dan Perikanan yang dinilai mampu menggambarkan

perkembangan penerimaan dan pengeluaran masyarakat perikanan secara bersamaan dalam suatu nilai indeks, atau dikenal juga dengan nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan / pembudidaya dengan indeks harga yang dibayar nelayan / pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan atau pembudidaya. Sedangkan indeks yang dibayar nelayan adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga nelayan atau pembudidaya, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan.

NTN (Nilai Tukar Nelayan) Tahun 2021 ditargetkan sebesar 101,7. Nilai indeks NTN tahun 2021 sebesar 96,92 indeks. Ketidaktercapaian indeks ini dari target turut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan harga dan produksi ikan yang menurun. Dibandingkan dengan Nilai indeks NTN tahun 2020 yang sebesar 93,35 indeks tahun 2021 meningkat sebesar 3,57 poin. Rendahnya Nilai NTN tersebut dipengaruhi pula oleh dua faktor yaitu variabel penurunan produksi perikanan yaitu produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sampai 95 persen.

Nilai NTN juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam (1). Penguatan Sistem Logistik Ikan dan jaminan harga ikan yang baik atau kompotitif di pasaran ; (2) bantuan sarana produksi perikanan ; (3) Penyediaan sarana pengisian BBM bersubsidi ; (4) Penguatan teknologi informasi tangkapan perikanan; dan (5) penguatan SDM Perikanan dan Kelautan. Sehingga nilai indeks yang diterima oleh nelayan lebih tinggi dari indeks yang dikeluarkan oleh nelayan yaitu nilai indeksnya di atas nilai 100.

Pada tabel 3.2.9 juga dapat dilihat perkembangan realisasi atas kinerja ini, dimana pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 101,2 realisasi tercapai sebesar 101,37. Tiinginya Nilai NTN di tahun 2019 tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel peningkatan produksi perikanan yaitu terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 121,76 persen yaitu dengan realisasi produksi

sebesar 148.953 ton dari target yang ditetapkan sebesar 122.333 ton pada tahun 2019. Dan produksi perikanan budidaya sebesar 321 persen atau dengan realisasi sebesar 91.233 ton dari target 28.422 ton.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.64 persen dibandingkan tahun 2020, meskipun belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 104,12 di tahun 2021. Kenaikan NTP ini disebabkan naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Kenaikan NTP tahun 2021 ini dipengaruhi pula oleh naiknya NTP di tiga subsektor pertanian yaitu NTP Subsektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan sedangkan penurunan terjadi pada sub sektor tanaman pangan, dan sub sektor peternakan.

Untuk Meningkatkan nilai tukar petani sub sektor peternakan, ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Bagaimana meningkatkan pendapatan petani;
2. Bagaimana meningkatkan produksi pertanian sub sektor peternakan.

Untuk mencapai target dan meningkatkan nilai tukar petani pada sub sektor peternakan, dicapai dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain adalah penyediaan pakan ternak, penyediaan bibit ternak, program penjaminan kesehatan hewan serta pengembangan penyuluhan ketenagaan pertanian sub sektor peternakan. Dan untuk lebih meningkatkan nilai tukar petani sub sektor peternakan ini kedepannya telah mulai dilakukan upaya-upaya yaitu perbaikan mutu genetik, teknologi pengolahan pangan, intensifikasi budidaya dan pengendalian penyakit menular strategis.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan nilai NTP per subsector di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.2.12
 Nilai Tukar Petani per Subsektor

SUB SEKTOR	NILAI NTP TAHUN 2019	NILAI NTP TAHUN 2020	NILAI NTP TAHUN 2021
Tanaman Pangan	104,23	99,17	103,78
Hortikultura	109,80	106,20	133,98
Tanaman Perkebunan Rakyat	96,26	109,72	121,00
Peternakan	101,88	104,13	111,28
Perikanan	93,80	93,35	100,26

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Indikator kinerja selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian dan kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi. PPH atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi, tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.

Pola konsumsi pangan kebanyakan masyarakat Indonesia masih terdapat ketimpangan hal ini dikarenakan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan

buah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih relative rendah. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Dari tabel 3.2.9 diatas dapat dilihat bahwa, di Provinsi Gorontalo, PPH konsumsi pada tahun 2021 menunjukkan angka 75,50. Dibandingkan PPH konsumsi tahun 2020 yang memiliki skor PPH sebesar 90,70, skor PPH tahun 2021 ini turun sebesar 15,20 poin. Skor PPH konsumsi menurun karena adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan/ekonomi masyarakat menurun sehingga daya beli masyarakat menurun termasuk membeli kebutuhan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi gizi keluarganya.

Dari tabel 3.2.9 diatas dapat dilihat pua bahwa capaian terhadap indikator kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di tahun 2021 mencapai 76,66 dari target yang ditetapkan sebesar 66,6 atau capaian sebesar 115,10. Dibandingkan skor PPH ketersediaan tahun 2020 yang mencapai angka 84,74 atau capaian sebesar 107,46 persen, skor yang dicapai di tahun 2021 ini turun sebesar 18,14 poin. Skor PPH Ketersediaan di tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa komoditi yang ketersediaannya bervariasi. Dimana terdapat peningkatan ketersediaan pangan utama seperti Beras dan Jagung yang tercukupi/surplus, namun terdapat beberapa komoditi yang mengalami defisit yaitu kategori umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua stakeholders terkait agar komoditi yang masih defisit bisa mengalami peningkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat gorontalo.

Meskipun demikian, hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan yang relatif stabil, juga tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan penduduk Provinsi Gorontalo sudah mulai beragam bergizi seimbang dan aman walaupun konsumsi masyarakat terhadap umbi-umbian dan buah/biji berminyak masih rendah. Dari sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, PPH ketersediaan didukung oleh perluasan areal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan bibit unggul tanaman dan

ternak, penambahan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi pertanian, optimalisasi pengairan dan peremajaan tanaman perkebunan. Begitupun dengan skor PPH Konsumsi, keberhasilan dalam menaikkan skor PPH konsumdi antara lain karena didukung oleh beberapa kegiatan yaitu dengan menerapkan kawasan rumah pangan lestari, promosi/kampanye pangan lokal, lomba cipta menu dan model pengembangan pangan pokok lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan program penanganan kerawanan pangan serta program pengawasan keamanan pangan.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan perbandingan kinerja Provinsi Gorontalo dan realisasi Nasional sebagai berikut :

Gambar 3.2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian dan kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	96,92	104,47	-
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	105,68	99,19	+
		Skor PPH Ketersediaan	76,66	-	-
		Skor PPH Konsumsi	75,50	94,70	-

Sumber Data : BPS, BPS Provinsi Gorontalo dan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Tujuan 3 : Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan akan

**SASARAN STRATEGIS :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
HUTAN, LAHAN, LAUT DAN PESISIR YANG
LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA MITIGASI
BENCANA**

diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Indeks Resiko Bencana dan Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Resiko Bencana	0,40	0,48	0,48	0,37	0,43	83,78	0,30	64,86
2	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitas	1.968 Ha	2.860 Ha	178 Ha	1.000 ha	120,7 ha	12,07	700,930	0,88

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.14 diatas, dapat dilihat bahwa capaian atas sasaran strategis terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 masih belum tercapai. Kondisi ini masih relatif sama dengan kinerja tahun 2020 yang juga masih belum mencapai target dan terus memerlukan dukungan penganggaran serta kebijakan-kebijakan untuk penanggulangannya. Dari kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran ini di tahun 2021 memperoleh capaian sebesar 83,78 persen untuk capaian indeks resiko bencana dan 12,07 persen untuk capaian luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Indikator kinerja luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1000 hektar realisasi hanya mencapai 120,7 hektar lahan kritis yang direhabilitasi. Hal ini masih kurang lebih sama dengan kondisi tahun sebelumnya dimana realisasi dari target di tahun 2020 sebesar 1.000 hektar, hanya mencapai 178 hektar lahan kritis yang direhabilitasi. Tidak tercapainya target di tahun 2020 dan bahkan di tahun 2021, di sebabkan adanya refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan penanganan terhadap lahan kritis akan dilanjutkan di tahun 2022 yang dibarengi dengan pengalokasian anggaran untuk mencapai target akhir RPJMD.

Dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya, dari target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 1.000 ha rehabilitasi luas lahan kritis, dapat terealisasi sebesar 2.860 hektar luas kawasan lahan kritis yang direhabilitasi atau capaian sebesar 286,00 persen. Tingginya capaian terhadap penanganan lahan kritis di tahun 2019 tersebut karena dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan lahan kritis sebesar 2015 ha dan Dana Bagi Hasil dana reboisasi sebesar 845 ha. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah kegiatan rehabilitasi hutan, kegiatan hutan manunggal, kegiatan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan perhutanan sosial dan kegiatan agroforestri.

Di Provinsi Gorontalo, lahan kritis dalam kawasan seluas 72.194,398 ha dan lahan kritis diluar kawasan sebesar 144.983,675 ha. Sehingga luas lahan kritis yang

harus direhabilitasi seluas 73.618,9 ha. Sementara itu, sampai dengan tahun 2022 yang merupakan periode baru RPJMD Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan kembali luas lahan kritis yang akan direhabilitasi sebesar 700.930 ha.

Selanjutnya, pada tabel 3.2.15 dibawah ini akan digambarkan tentang luas kawasan hutan Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2.15
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

No.	Kawasan Hutan	Luas (ha)
(1)	(2)	(3)
1.	Hutan Konversi	196.522,47
2.	Hutan Lindung	202.348,52
3.	Hutan Produksi Terbatas	252.663,30
4.	Hutan Produksi Tetap	90.092,02
5.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	23.254,95
	Jumlah	761.881,27

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2022

Berikutnya adalah indikator kinerja untuk mengukur tingkat mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo, ditetapkanlah Indeks Resiko Bencana sebagaimana pada tabel 3.2.14, tetapi pada penetapan targetnya, angka tersebut lebih tepat adalah untuk Indeks Ancaman Bencana atau kerentanan yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta jenis ancaman.

Dari tabel 3.2.14 dijelaskan bahwa, pada tahun 2018, Indeks Ancaman Bencana Provinsi Gorontalo sebesar 0,40 dari target sebesar 0,54, atau capaian sebesar 125,93 persen. Indeks Ancaman Bencana dapat diketahui dengan menghitung rata-rata berbagai ancaman bencana yang ada di Kabupaten/Kota. Sebagaimana data tersebut, indeks ancaman bencana Provinsi Gorontalo masuk pada kategori "sedang", dimana terdapat tiga kategori ancaman bencana yaitu

indeks <0,3 adalah kategori ancaman bencana rendah, indeks 0,3 -0,6 adalah kategori ancaman bencana sedang dan indeks 0,6 – 1 adalah kategori ancaman bencana tinggi. Sementara itu, di tahun 2020 terdapat indeks ancaman bencana sebesar 0,48.

Dalam Capain Target Kinerja tahun 2020 indeks resiko bencana Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 110 persen, sedangkan dalam target yang ada bahwa target dalam hal ini menurunkan indeks resiko bencana setiap tahun sebesar 30 persen dari indeks resiko bencana Pusat, sehingga capaian kinerja atas indeks resiko bencana di tahun 2020 hanya sebesar 88,37 persen. Peningkatan terhadap indeks resiko bencana Provinsi Gorontalo ini disebabkan banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi serta adanya rasionalisasi anggaran sehingga banyak anggaran yang terfokus ke kegiatan penanganan Covid-19.

Provinsi Gorontalo yang pada zaman colonial Belanda dikenal dengan sebutan semenanjung Gorontalo(Gorontalo Peninsula). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu, kondisi tektonik wilayah Gorontalo juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo. Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Selama periode 5 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2021, secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Resiko Sedang dengan nilai indeks 126,64.

Indeks Resiko Bencana dihitung berdasarkan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities) dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa

bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir dan lainnya. Komponen kerentanan adalah : kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsure ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi dan pencegahan.

Indeks Resiko Bencana diketahui dengan menggunakan formula :

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

atau Resiko adalah Bahaya dikalikan Kerentanan dibagi dengan Kapasitas.

Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana, meliputi Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Penanggulangan bencana di daerah khususnya di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan seluruh stakeholders. Wilayah Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana atau yang dikenal dengan mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo, telah dilakukan beberapa program/kegiatan antara lain adalah sosialisasi desa tangguh bencana yaitu bagaimana upaya masyarakat untuk lebih mandiri dan tanggap terhadap bencana dan sekolah madrasah aman bencana yang menjadikan sekolah-sekolah menjadi aman bencana. Untuk menurunkan Indeks Ancaman Bencana di Provinsi Gorontalo didukung oleh beberapa program dan kegiatan baik yang sudah dilakukan maupun yang masih dalam proses pembangunan :

- 1). Dibangunnya kanal-kanal untuk mengatasi bencana longsor;
- 2). Telah dilakukan normalisasi sungai-sungai di wilayah Gorontalo dan juga revitalisasi danau Limboto guna mengatasi masalah banjir;
- 3). Dibangunnya tanggul-tanggul pengaman sungai dan pantai;
- 4). Dibangunnya cek dam untuk penampungan air;
- 5). Dilakukannya program-program penghijauan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- 6). Dan mungkin yang paling penting yang harus ditempuh untuk mengurangi resiko dampak bencana adalah sosialisasi secara intensif kepada masyarakat utamanya masyarakat yang berada di daerah atau lokasi rawan bencana. Menggugah kembali kesadaran masyarakat akan sadar bencana yaitu kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian dengan

hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di daerah yang rawan bencana dengan sebaik-baiknya dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana.

Yang terbaru dalam mengatasi bencana banjir di Gorontalo adalah rencana pembangunan bendungan Bulango Ulu yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango, dimana sejak tahun 2019 telah ditetapkan lokasi pembangunannya dan sampai dengan tahun 2020 sudah masuk tahap pembebasan lahan. Dan pada tahun 2021 telah dimulai pembangunan bendungan tersebut dan sudah mencapai 22 persen. Dengan adanya bendungan ini di harapkan akan dapat mengatasi masalah banjir di Gorontalo khususnya banjir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bone Bolango, dimana ketiga daerah ini memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir. Dibawah ini dalam tabel 3.2.16 akan di gambarkan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dengan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.2.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	126,64	143,6	+
		Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	120,7 Ha	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Data IRB Indonesia BNPB 2022



Tujuan 4 : Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan akan diukur dengan 2 (dua)

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KUALITAS DAN
KUANTITAS INFRASTRUKTUR
DAERAH**

indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah pengukuran terhadap proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, dan Indeks E-Government. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	222,74 km	237,49 km	254,06 km	167,52 km	373,42 km	145,01	278 km	134,32
2	Indeks E-Government	1,48	3,41	3,18	3,83	2,51	65,53	3,85	65,19

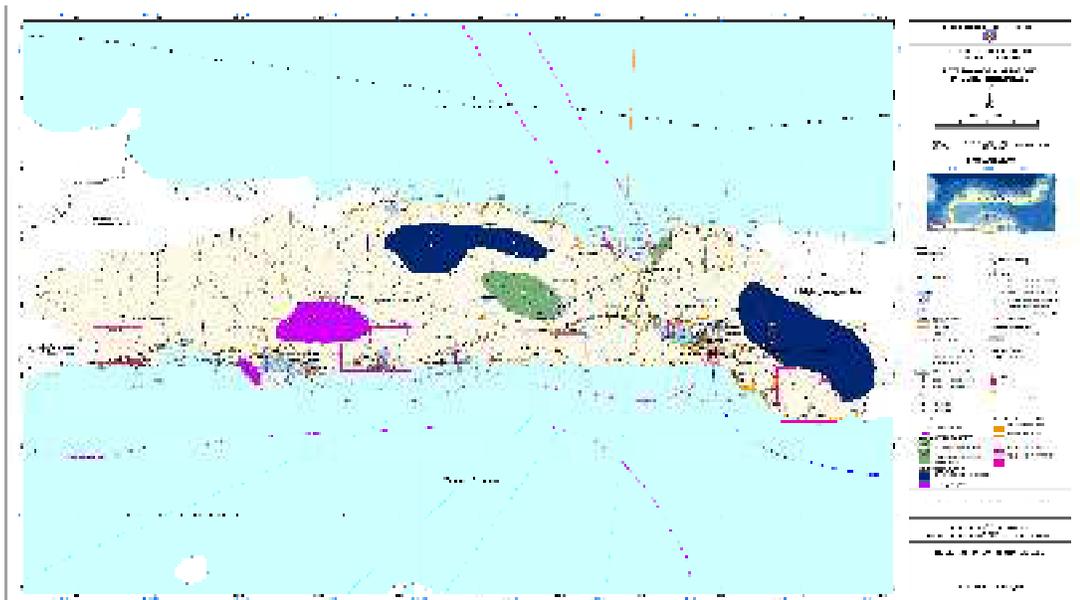
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

Dari tabel 3.2.17 diatas dapat diketahui bahwa tujuan Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi dengan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah yang dicapai melalui dua

indikator kinerja tersebut dapat dicapai dengan baik, meskipun capaiannya tidak mencapai 100 persen atau target hanya dapat dicapai sebesar 65,53 persen untuk indeks e-government dan untuk infrastruktur jalan mencapai 145,01 persen atau 373,42 km jaringan jalan dalam kondisi baik.

Dewasa ini, pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat strategis bagi peningkatan daya saing dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Olehnya, penyediaan infrastuktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintah periode 2017-2022 dan merupakan program berkelanjutan dimana pada periode sebelumnya hanya peningkatan infrastruktur, maka pada periode ini diharapkan infrastruktur yang dibangun lebih merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan lebih utama adalah sebagai sarana konektivitas perekonomian masyarakat Provinsi Gorontalo. Dibawah ini, akan digambarkan peta kawasan strategis Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Gambar 3.2.18
Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar khususnya pada ruas jalan provinsi yang dalam kondisi mantap dan baik maupun ruas strategis provinsi sebagai akibat terbukanya akses transportasi ke pusat-pusat kegiatan / perekonomian dan ketempat-tempat wisata. Hal ini telah diwujudkan dengan dukungan pelaksanaan program penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Menuju Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi Pemeliharaan/Peningkatan berkala jalan Provinsi serta Pemeliharaan Rutin jalan provinsi.

Selanjutnya akan digambarkan jaringan jalan Provinsi Gorontalo sebagaimana pada gambar 3.2.19 dibawah ini :

Gambar 3.2.19
Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

Pada tabel 3.2.17 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2020 capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2020 ditargetkan 257,52 km, realisasi sebesar 254,06 km. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya Refocusing pada Anggaran Pembangunan Jalan akibat Pandemi Covid-19. Capaian kinerja tahun 2019 terhadap indikator kinerja ini mencapai 237,49 km atau jalan dalam kondisi mantap sebesar 47,67 persen. Pada tahun 2018, proporsi panjang jaringan jalan sepanjang 222,74 km atau jalan kondisi mantap 47,68 persen.

Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah juga diukur dengan indikator kinerja Indeks *E-Government*. Dari tabel 3.2.17 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas Indeks *E-Government* Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 3,18, dari target yang ditetapkan sebesar 3,82 atau capaian sebesar 83,25 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai indeks sebesar 3,41 dari target sebesar 3,80 atau capaian sebesar 89,74 persen, capaian di tahun 2020 ini turun sebesar 0,23 poin. Dan dibandingkan juga dengan capaian kinerja di tahun 2018, capaian di tahun 2020 ini cukup tinggi dimana pada tahun 2018, Indeks *E-Government* mencapai indeks sebesar 1,48. Penurunan indeks *E-Government* atau saat ini lebih dikenal dengan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) tahun 2020 ini disebabkan oleh adanya perubahan kategori pada predikat indeks SPBE yang sebelumnya adalah angka maksimal dan kategori tertinggi dari indeks SPBE adalah 4,0 (Sangat Baik), maka berubah menjadi 5,0 (Memuaskan). Terjadi juga perubahan Instansi penyelenggara evaluasi Indeks *e-Government* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian PANRB. Karena terjadi pula perubahan instansi penyelenggara maka indikator penilaian juga berubah. Sehingga capaian kinerja tidak terpenuhi 100 persen. Diperlukan pula perbaikan dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang menjadi obyek evaluasi.

Pencapaian Indeks *E-Government* di tahun 2020 ini sudah memenuhi kriteria BAIK. Indeks ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks SPBE/indeks *E-Government*). Indeks didapatkan berdasarkan Evaluasi Mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator Internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dimaksud. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang capaiannya dalam bentuk Indeks *E-Government* atau *e-Government Development Index* (EGDI) ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan publik. Penilaian juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Di tahun 2021, indeks SPBE Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,51 atau dengan kategori "cukup". Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian di tahun 2021 ini turun sebesar 0,67 poin. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagaimana tabel 3.2.20 dibawah ini :

Tabel 3.2.20
Predikat Indeks SPBE/*E-Government*

No.	Nilai Indeks	Predikat	Ket.
1	4,2 – 5,0	Memuaskan	
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	
3	2,6 - <3,5	Baik	
4	1,8 - <2,6	Cukup	Nilai Indeks Provinsi Gorontalo
5	< 1,8	Kurang	

Sumber : PermenPAN RB No 5 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup

penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan daerah yang dievaluasi mencakup tiga hal, yakni domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE.

Untuk kebijakan internal dibagi menjadi dua aspek, yaitu tata kelola dan layanan. Sedangkan domain tata kelola, ada tiga aspek yang akan dinilai, yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, domain layanan SPBE terdapat dua aspek yang akan dievaluasi, yakni administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Masing-masing aspek memiliki indikator penilaian yang berbeda yang jumlahnya ada 35 indikator.

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

Bila dibandingkan dengan kinerja nasional terhadap Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) capaian Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 masih diatas Nasional yang dengan indeks sebesar 2,24 (Cukup). Kementerian PANRB sebagai koordinator SPBE mengapresiasi kerja sama instansi pemerintah dan juga Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam penerapan SPBE sehingga terjadi peningkatan EGDI. Kementerian PAN RB terus mendorong kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengoptimalkan kualitas penerapan SPBE dalam upaya mencapai indeks SPBE Nasional yang terus bergerak naik.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penerapan SPBE di instansi pemerintahan untuk menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) yang ditunjukkan oleh nilai indeks. Tahun ini, karena berada di tengah situasi pandemi, evaluasi SPBE dilakukan melalui metode daring. Evaluasi mandiri dan penilaian lainnya melalui *website* aplikasi evaluasi SPBE, Sementara tahapan sosialisasi dan wawancara menggunakan media *video conference*.

Selanjutnya, akan digambarkan perbandingan pencapaian kinerja pengelolaan SPBE Provinsi terhadap Kab/Kota di wilayah Gorontalo berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.2.21
Perbandingan Realisasi Kinerja pengelolaan SPBE dengan Kab/Kota

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	2	3	4
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,51	Cukup
2	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	1,31	Kurang
3	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	2,02	Cukup
4	Pemerintah Kota Gorontalo	1,90	Cukup

Sumber Data : Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PAN RB Tahun 2021

Dibawah ini dalam tabel 3.2.22 akan di gambarkan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dengan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.2.22
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	373,42 km	-	-
		Indeks E-Government	2,51	2,24	+

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PAN RB Tahun 2021



Tujuan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan telah diukur sebelumnya dengan 5 (lima) Indikator Kinerja

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN
BERKEADILAN**

Utama (IKU) dan selanjutnya akan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja pendukung IKU. Evaluasi dan analisis capaian kerjanya dari indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut: Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Laju Inflasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Inflasi	2,15 %	3,25 %	0,81 %	3,42%	2,59%	124,27	3.30%	30,00

Sumber Data : BPS provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.23 diatas dapat dilihat bahwa, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja pendukung IKU. Sebelumnya telah diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan. Sebagaimana tabel diatas, laju inflasi Provinsi Gorontalo

tahun 2018 sebesar 2,15 persen, dengan capaian kinerja sebesar 140,28 persen. Dan tahun 2019 sebesar 3,25 persen. Dan tingkat inflasi tahun 2020 sebesar 0,81 persen. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Olehnya, pada tujuan dan sasaran ini telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran.

Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas makro. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa didalam wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Inflasi Kota Gorontalo tahun 2021 sebesar 0,92 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 3 kelompok pengeluaran, 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,77 persen, kelompok transportasi sebesar 0,63 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin Rumah tangga sebesar 0,39 persen. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar Rumah tangga sebesar 0,13 persen. Kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,05 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok kesehatan sebesar -0,25 persen. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,12 persen, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,06 persen. Sementara itu, kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya.

Dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2020, dimana inflasi bahan Makanan pada Bulan Desember 2020 di Kota Gorontalo Sebesar 0,52 persen, inflasi di tahun 2021 ini naik sebesar 0,40 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota

Gorontalo tahun 2021 sebesar 2,59 persen, sedangkan laju inflasi Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,59 persen.

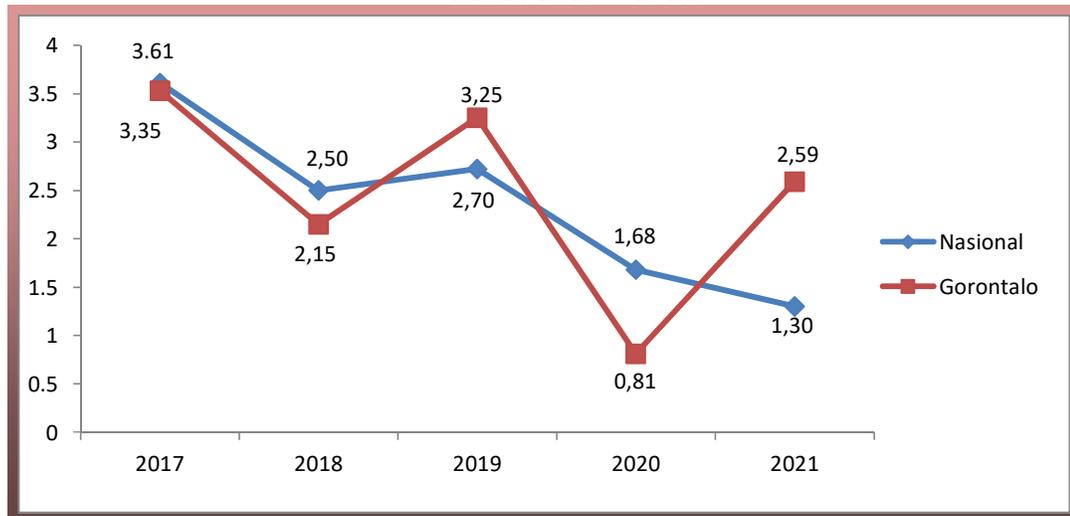
Indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang di konsumsi oleh Rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi di ukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke public setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK lama (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Dalam kurun waktu 5 tahun, inflasi tahunan Gorontalo sangat berfluktuasi jika dibandingkan dengan laju inflasi tahunan nasional. Di tahun 2017, inflasi Kota Gorontalo sebesar 3,53 persen dan inflasi Nasional sebesar 3,61 persen. Pada tahun 2018, Kota Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,15 persen, sedangkan inflasi Nasional sebesar 2,50 persen, di tahun 2019, inflasi Kota Gorontalo sebesar 3,25 persen masih diatas inflasi Nasional yang sebesar 2,72 persen, pada tahun 2020, inflasi sebesar 0,81 sedangkan Nasional sebesar 1,68 persen. Dan pada tahun 2021, laju inflasi Gorontalo sebesar 2,59 persen sedangkan Nasional sebesar 1,30 persen.

Perkembangan inflasi Gorontalo di bandingkan dengan Nasional selaman 6 tahun terakhir tergambar pada grafik 3.2.24 sebagai berikut :

Grafik 3.2.24
Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional dan Gorontalo (persen)
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Grafik 3.2.24 tersebut diatas menunjukkan bahwa, pola inflasi Kota Gorontalo fluktuatif bila dibandingkan dengan inflasi nasional dan cenderung dibawah inflasi Nasional. Hal ini terlihat dari laju inflasi tahunan, selama periode tahun 2017 – 2021, dimana terdapat dua periode waktu yang menunjukkan nilai inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021.

Strategi Pengendalian Inflasi Oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Keberhasilan pengendalian harga sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi dan koordinasi antar instansi dan lembaga dalam upaya pengendalian harga pangan dengan berpatongan pada *Roadmap* TPID yang terdiri dari strategi 4K sebagai pilar utama yaitu :

1. Keterjangkauan harga diwujudkan dengan menjaga stabilitas harga diseluruh Kabupaten/Kota dan mengelola permintaan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Peningkatan ketahanan pangan.
 - b. Pengendalian barang pokok dan penting.

- c. Diversifikasi konsumsi.
 - d. Pengelolaan permintaan di HKBN.
2. Ketersediaan Pasokan dipenuhi melalui peningkatan produksi, cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan impor-ekspor pangan serta perkuatan kelembagaan untuk memastikan ketersediaan pasokan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah :
- a. Peningkatan produktivitas dan luas lahan.
 - b. Penguatan produktivitas perikanan.
 - c. Penguatan cadangan pangan.
 - d. Program pemberdayaan Petani/Nelayan.
 - e. Optimalisasi sistem resi gudang.
3. Kelancaran distribusi diupayakan melalui kerjasama perdagangan antar daerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Mendorong kerjasama perdagangan antar daerah.
 - b. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
 - c. Peningkatan pelayanan angkutan.
4. Komunikasi efektif dicapai melalui perbaikan kualitas data dan perkuatan koordinasi pusat dan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan adalah :
- a. Perbaikan kualitas data terkait pangan.
 - b. Peningkatan koordinasi dan kapasitas anggota TPID.



Tujuan 6 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, dimana dua

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA AKSES DAN
KUALITAS PENDIDIKAN**

indikator kinerja untuk mencapai tujuan ini merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang telah dituangkan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK dan Angka Melek Huruf. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.25
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,71%	78,75%	77,30%	77,63%	77,75%	100,15	78,00%	99,68
2	Angka Melek Huruf	99,44%	99,86%	99,89%	99,98%	99,89%	99,91	100 %	99,89

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Dari tabel 3.2.25 dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai capaian kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian dari ke 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan memiliki capaian rata-rata diatas 95 persen. Dibawah ini akan digambarkan beberapa capaian kinerja bidang pendidikan Provinsi Gorontalo selama tahun 2019-2021, sebagai berikut :

Untuk mengetahui nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK dapat digunakan rumus jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dikali 100.

Dewasa ini, peningkatan sumber daya manusia lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk pengenyam pendidikan terutama masyarakat usia sekolah (7-24 tahun). Guna peningkatan mutu/kualitas pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo ini, telah dilakukan Perluasan akses pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, baik melalui program perluasan akses pendidikan menengah maupun melalui program bantuan operasional sekolah serta program-program pendidikan menengah dan pendidikan khusus lainnya. Selain sarana fisik yang memadai, Kualitas pendidikan juga tak lepas dari ketersediaan tenaga pengajar yang cukup. Rasio murid-guru menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan kualitas kegiatan pengajaran. Standar rasio murid-guru yang baik adalah 20. Provinsi Gorontalo memiliki rasio murid-guru yang baik pada jenjang pendidikan dasar samapi menengah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dituntut pula kualitas guru dan tenaga kependidikan yang didorong pula dengan program pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Dan tak kalah penting juga adalah meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan yang non PNS. Pada tahun 2019, capaian kinerja ini sebesar 102,43 persen. Dimana target di tahun 2019 sebesar 76,88 persen, realisasi sebesar 78,75 persen dan pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 100,06 persen. Pada tahun 2021, target kinerja

ditetapkan sebesar 77,63 persen dengan realisasi 77,75 persen atau capaian sebesar 100,15 persen. Capaian kinerja ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 77,30 persen, naik sebesar 0,12 persen.

Faktor pendukung tercapainya kinerja ini dipengaruhi oleh dukungan peningkatan mutu akses dan tata kelola satuan pendidikan serta inetegrasi dengan seluruh stakeholders serta adanya dukungan berupa program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak swasta melalui DAU, DAK, berupa BOS, Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Meubelair, Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian dana PIP (Program Indonesia Pintar), dan PPDB online yang sudah menggunakan sistem zonasi untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan serta pembangunan Fasilitas Penunjang lainnya baik ditingkat SMA , SMK dan Pendidikan Khusus.

Selanjutnya, untuk mengetahui dan menggambarkan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan adalah Angka Melek Huruf. Pada tabel 3.2.24 diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 99,86 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, angka melek huruf di Provinsi Gorntalo ini mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2018 angka melek huruf di Provinsi Gorontalo sebesar 99,44 persen atau naik sebesar 0,42 persen. Juga pada tahun 2020 naik mencapai 99,89 persen atau 99,95 persen dari target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,91 persen dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,98 persen.

Angka melek huruf berkaitan langsung dengan pendidikan dasar yaitu mengukur tingkat kemampuan membaca dan menulis. Sejak tahun 2016, kewenangan terhadap pendidikan dasar ini adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Tetapi Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah yang memiliki kewenangan atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemeintahan Kabupaten / Kota termasuk bidang pendidikan dasar ini, tidak lantas melepas tanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan dasar di wilayah Provinsi Gorontalo. Olehnya, pemeintah Provinsi

Gorontalo senantiasa melakukan upaya-upaya terkait melek huruf di Provinsi Gorontalo ini, antara lain adalah :

1. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Bappeda untuk pemberian bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Dinas terkait dalam hal ini Bappeda dan Dinas pendidikan Kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Balai Pengembangan Paud dan pendidikan masyarakat.

Tercapainya kinerja ini disebabkan oleh faktor utama adalah tingkat kesadaran para orang tua atau masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Juga didorong oleh program pemerintah yaitu program pendidikan untuk rakyat, dimana pendidikan dasar sampai dengan menengah gratis. Dengan program ini, semua lapisan masyarakat usia sekolah bisa menikmati pendidikan gratis.

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.2.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	77,75	61,65	+
		Angka Melek Huruf	99,89	99,78	+

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2022

Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Angka Kelahiran Total (*fertility rate*). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.2.27
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,5	2,5	2,5	2,45	2,36	103,67	2,4	95,83

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.27 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja bidang kesehatan di Provinsi Gorontalo terhadap angka kelahiran total masih sangat tinggi. Angka kelahiran total (*fertility rate*) di tahun 2021 mencapai 2,36 dari target sebesar 2,45 atau capaian sebesar 103,67 persen. Diabndingkan dengan tahun 2020, dimana angka kelahiran total berada di 2,5, maka capaian di tahun 2021 ini meningkat sebesar 0,14 poin. Dengan turunnya angka kelahiran total ini, berarti kinerja bidang kesehatan juga semakin baik.

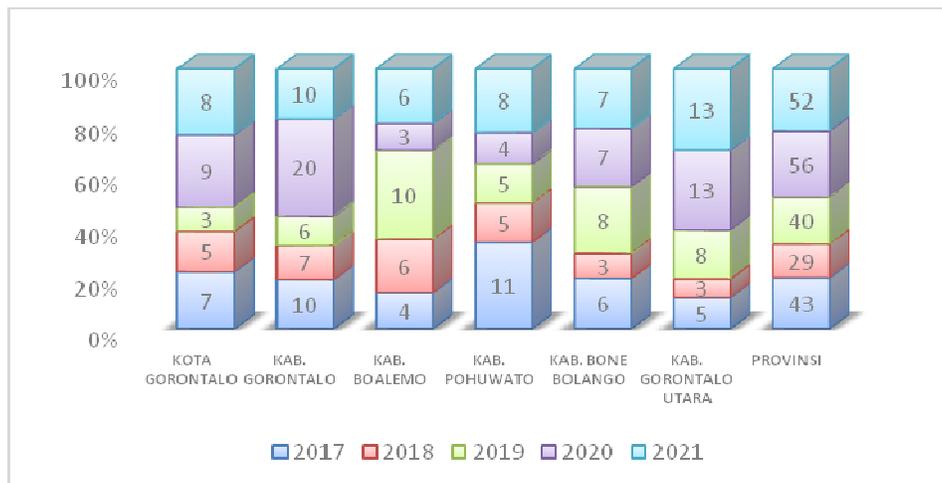
Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) adalah suatu indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat

keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Fertility Total Rate (FTR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Banyak faktor yang mempengaruhi FTR yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan angka harapan hidup dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk.

Pada grafik 3.2.28 dibawah ini akan digambarkan kondisi kematian ibu di Provinsi Gorontalo per tahun di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 3.2.28
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021

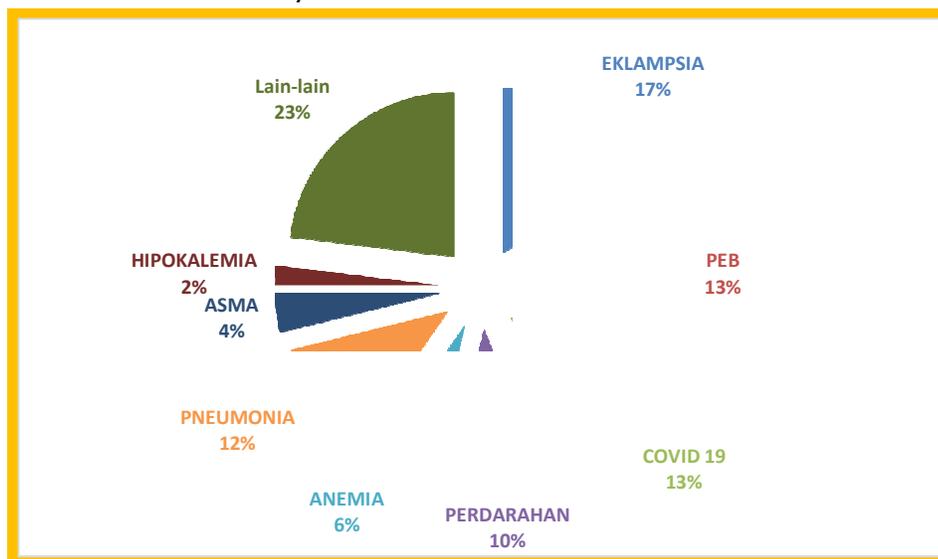


Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program-program pelayanan kesehatan masyarakat, program pengendalian penduduk dan program kesehatan masyarakat yang selalu mendukung kinerja bidang kesehatan sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi serta dapat mengatur jumlah kelahiran. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus kematian ibu di Provinsi Gorontalo mencapai 220 kematian. Pada tahun 2017 kematian ibu sebesar 43 kematian, di tahun 2018 29 kematian, tahun 2019 terjadi 40 kematian, tahun 2020 kasus kematian sebesar 56 dan di tahun 2021 sebesar 52 kematian. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, di tahun 2020 adalah jumlah kematian ibu tertinggi.

Adapun penyebab dari kematian ibu dapat di lihat pada gambar 3.2.29 sebagai berikut:

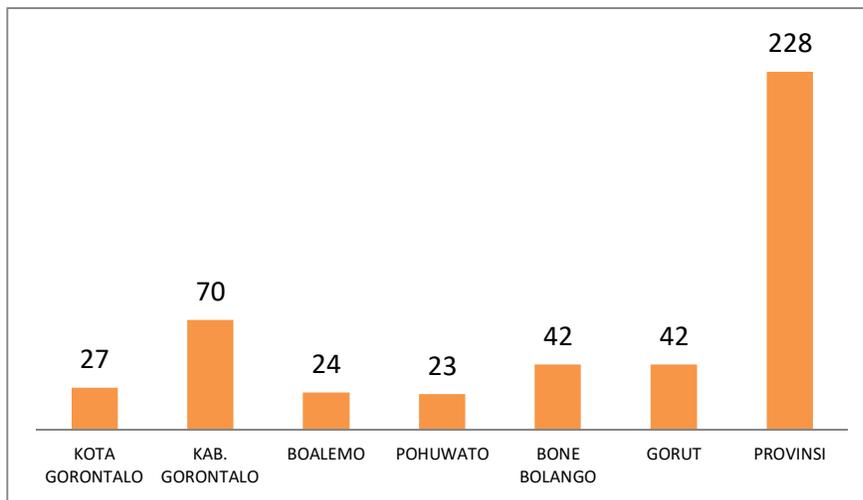
Gambar 3.2.29
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Adapun rincian jumlah kematian Bayi di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut:

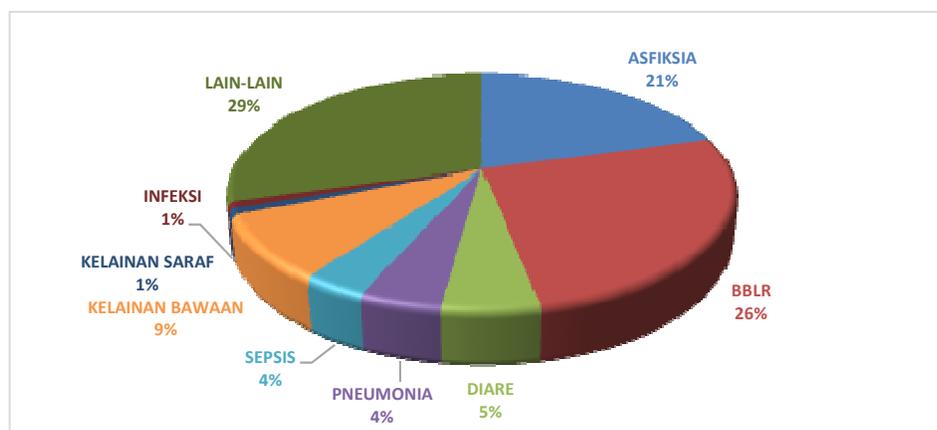
Gambar 3.2.30
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat di lihat bahwa Kabupaten Gorontalo menjadi penyumbang terbesar angka kematian bayi di provinsi Gorontalo yakni 70 kematian bayi, dan paling rendah di Kabupaten Pohuwato dengan 23 kematian bayi. Adapun penyebab kematian bayi dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

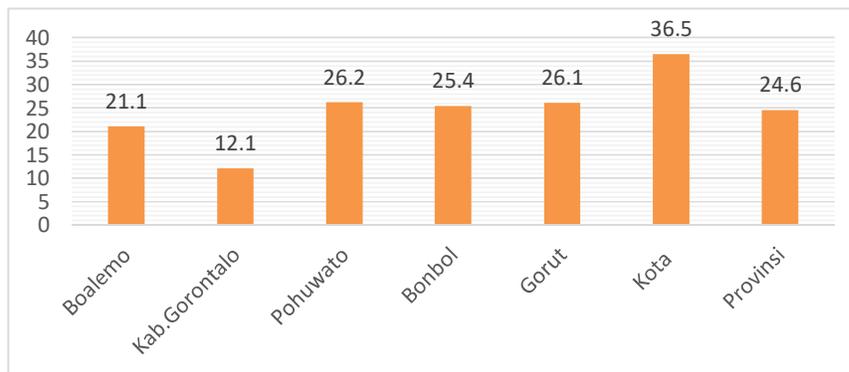
Gambar 3.2.31
Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sementara itu, Angka Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo tahun 2021 dapat di lihat pada grafik dibawah ini :

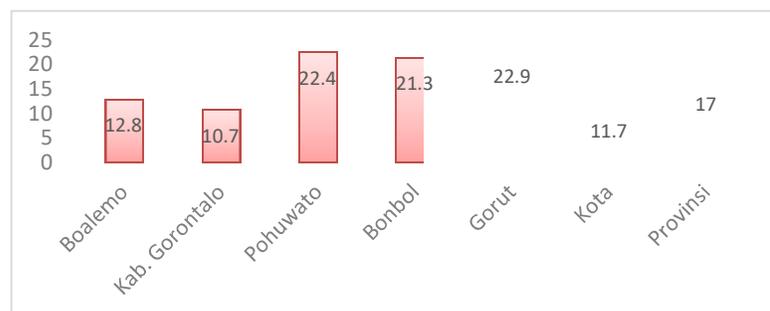
Gambar 3.2.32
Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2021 di Provinsi Gorontalo Prevalensi stunting paling tinggi di Kota Gorontalo sebesar 36.5 persen dan paling rendah di Kabupaten Gorontalo sebesar 12,1 persen. Dan prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo sebesar 24.6 persen. Untuk kebijakan intervensi stunting oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo melalui pemberian Fe ibu hamil, memberikan makanan tambahan pendamping bagi ibu hamil dan balita berupa pengadaan bafer stok Susu dan Biskuit. Sementara itu, Angka Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita dapat dilihat pada grafik 3.2.33 sebagai berikut:

Gambar 3.2.33
Prevalensi Kekurangan Gizi di Kabupate/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat Prevalensi Kekurangan Gizi pada tahun 2021 paling tinggi di kabupaten Gorontalo utara dan Pohuwato 22.9 dan 22.4, dan Kabupaten Gorontalo Prevalensinya paling kecil yakni 10,7 persen. Sedangkan untuk Provinsi sendiri 17 persen jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021 sudah mencapai target.

Pada tahun 2021, jumlah kematian ibu dan angka prevalensi kekurangan gizi pada balita di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan rasio daya tampung rumah sakit rujukanpun masih terbatas, sehingga perlu ada penanganan lebih untuk 2 tahun kedepan agar bisa mencapai target kinerja pada akhir RPJMD. Sentara jumlah kematian bayi dan angka prevalensi stunting, pun masih perlu kerja extra dan kerja cerdas untuk bisa terus menekan angka kematian bayi dan stunting. Perlu adanya peran lintas sektor mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan provinsi serta stakeholders terkait.

Selanjutnya, akan adalah perbandingan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi Nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.2.34
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,36	2,45	+

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional dan Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN
BUDAYA DAN IMAN DAN TAQWA
(IMTAQ)**

Pembangunan Budaya dan Imtaq. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional dan Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk. Capaian kinerja

Tabel 3.2.35

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
1	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	8 jenis	7 jenis	1 jenis	3 jenis	7 jenis	233,33	15 jenis	80,00
2	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,22	0,23	0,23	0,24	0,23	95,83	0,25	92,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.35 dapat diketahui bahwa sasaran strategis terwujudnya pembangunan budaya dan iman dan taqwa (Imtaq) di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mendapatkan kriteria penilaian sangat tinggi dengan kode warna hijau tua. Penetapan indikator kinerja ini dalam rangka mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Budaya dan Keagamaan yang lebih semarak. Sebagai daerah dengan filosofi "adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah" maka peningkatan minat masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta

dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak, lebih membudaya di seluruh lapisan masyarakat;

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pelestarian warisan budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya daerah pada ajang Nasional maupun Internasional. Juga guna mempertahankan hak milik atas warisan budaya Gorontalo tersebut, maka dilakukan upaya-upaya guna memperoleh pengakuan Nasional maupun Dunia. Sebagai gambaran singkat, akan diuraikan tentang warisan budaya gorontalo sebagai berikut :

"Sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo memiliki aneka ragam kesenian daerah baik tari, lagu, rumah adat, dan pakaian adat. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen penuh terhadap pelestarian seni dan budaya peninggalan leluhur Daerah Gorontalo. Provinsi Gorontalo yang dijuluki Serambi Madinah dengan menjunjung adat Gorontalo tentu sangat mengedepankan budaya lokal dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di daerah. Olehnya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian seni dan budaya banyak mendapat perhatian pemerintah. Gorontalo memiliki warisan budaya dalam bentuk tarian diantaranya adalah tari dana-dana yang merupakan tari pergaulan remaja Gorontalo. Budaya Gorontalo yang masih lestari antara lain adalah tahapan pada pernikahan adat yang dimulai dari Mopoloduwo rahasia, Tolobalango, Depito Dutu, Mopotilandahu, Tari Saronde, Akad Nikah. Budaya Gorontalo lainnya adalah tujuh bulanan atau dalam bahasa Gorontalo Tondhalo, Aqiqah, Khitanan dan Beat, Sapaan Atau Toli, Tumbilotohe, Meriam Bambu (dalam bahasa Gorontalo Bunggo) dan Walima. Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki adat isti adat dan warisan budaya yang sangat beragam. Dan untuk melestarikan warisan budaya tersebut, sehingga nantinya diakui ditingkat Nasional bahkan Internasional, maka dilakukan Pemberdayaan Pelaku Budaya Dalam Melestarikan Kebudayaan serta Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Akan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya melalui program Program Pembinaan Kebudayaan".

Pada tahun 2018, pemerintah pusat mengakui 8 warisan budaya tak benda yang ada di Provinsi Gorontalo dan pada tahun 2019, pemerintah pusat kembali mengakui 7 WBTB yang berasal dari daerah Gorontalo yang diantaranya adalah :

1. Upiya Karanji yaitu Peci Anyam Rotan Khas Gorontalo berwarna natural atau coklat yang merupakan 100 persen produk Khas Gorontalo yang terbuat dari akar pohon mintu. Sedangkan bahan bakunya hanya terdapat di pedalaman hutan Gorontalo.



2. Molonthalo yaitu upacara adat selamat yang menandai tujuh bulan usia kehamilan. Upacara adat molonthalo dilaksanakan bukan saja hanya sebagai sebuah tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan, lebih dari itu diyakini sebagai sebuah upacara yang sakral atas dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru.



3. Mohuntingi yaitu upacara gunting rambut sebagai salah satu jenis budaya daerah Gorontalo yang pelaksanaan upacara pada hari ketujuh kelahiran bayi, disunnahkan untuk memotong rambut si bayi.



4. Tidi Lo O'ayabu yaitu Tarian Tradisional Gorontalo senantiasa berpijak pada pola-pola tradisi Gorontalo. Tari Tidi merupakan tarian klasik Gorontalo yang berkembang pada abad ke 17 dan 18 di kalangan istana, yaitu raja-raja dan kaum bangsawan, yang memiliki kristalisasi artistik yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang sehingga memiliki nilai Tradisional. Tidi berarti tari, Kata tidi menguatkan bahwa tarian ini merupakan jenis tarian klasik.



5. Ilabulo yaitu makanan tradisinal khas Gorontalo yang merupakan sajian tepung sugu yang berisi campuran telur ayam, ati ampela, daging ayam dan sapi, lalu dibumbui rempah dan dibungkus daun pisang. Setelah dibungkus lalu direbus dan bisa juga dibakar sesuai selera para penikmat kuliner.



6. Tili'aya yaitu merupakan salah makanan khas Gorontalo yang menjadi santapan khas malam pertama sahur masyarakat Gorontalo tempo dulu. Kue yang terbuat dari campuran gula merah, telur, dan santan ini hanya dijadikan menu makan sahur saja. Kue tili'aya sengaja dibuat oleh orang Gorontalo terdahulu berfungsi sebagai penahan dahaga ketika awal puasa di mana banyak orang yang kesulitan menahan rasa haus dan lapar yang amat sangat. Pada acara adat biasanya



tili'aya disajikan sebagai lauk atau pelengkap nasi dan makanan berat lainnya. Tiliaya biasanya disajikan pada saat pelaksanaan Tahlilan, Tiliaya diletakkan di dekat nasi kuning dan jadi rebutan usai tahlilan. Waktu lain untuk menyantapnya adalah pada saat upacara adat atau pada saat Ramadhan.

7. Tapa tonggo adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Gorontalo.

Tapa berarti tendang dan Tonggo berarti jongkok. Permainan ini dikenal pada masa pemerintahan kerajaan Suwawa abad ke 14. Tapa Tonggo sebagai salah satu olahraga tradisional masyarakat, hal ini sesuai dengan penggalian pengamatan pemenuhan persyaratan sebagai salah satu olahraga tradisional yang perlu dimasyarakatkan.



Pada tahun 2020, jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan Nasional sebanyak 1 jenis dari target yang ditetapkan sebanyak 3 jenis warisan budaya. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan 10 warisan budaya gorontalo untuk memperoleh pengakuan Nasional/Internasional.

Dari 10 jenis yang diusulkan di tahun 2020, hanya 1 jenis warisan budaya yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 sehingga tim evaluasi atas keberadaan warisan budaya tidak bisa berkunjung ke daerah gorontalo. 1 (satu) jenis warisan budaya yang ditetapkan di tahun



2020 tersebut adalah Turunani. Istilah Turunani berasal dari kata *tarana nama ya tara* yang berarti syair yang dilagukan dan berdendang. Syair – syair Turunani merupakan syair – syair yang di susun oleh para sufi sebagai ahli tasawuf

berbahasa arab dan menggunakan alat musik rabana yang di gunakan sebagai pengiring. Syair turunani meriwayatkan garis keturunan atau silsilah Nabi Muhammad saw. Dalam pelaksanaannya sebagai bagian dari kesenian yang bernuansa Islami maka Turunani menggunakan alat musik seperti rebana. Fungsi turunani yaitu selain untuk hiburan dan memeriahkan pesta, juga dikaitkan dengan harapan mendapat berkah dari Allah Yang Maha Esa. Amanat utama ialah mengelukan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

Turunani di Gorontalo sering dijumpai atau selalu dihadirkan pada beberapa upacara adat, baik dalam upacara adat penobatan, aqiqah, khitanan, maupun upacara adat pernikahan, yang dilangsungkan pada pagi hari, siang, sore, dan malam hari, tergantung dari konteks upacara adat yang dilaksanakan. Terkait dengan bentuk penyajian turunani dalam kebudayaan Masyarakat Gorontalo memiliki perbedaan antara satu upacara dengan upacara adat lainnya khususnya dalam upacara adat Pernikahan. Turunani selain melantukan syair berbahasa arab, di dalamnya juga memiliki syair – syair berbahasa Gorontalo.

Pada tahun 2021, warisan budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya Nasional yaitu : Tidi lo tihu’o, tidi lo maluo, tidi daa, tahuda, leningo, dana-dana dan buruda. Dari ke tujuh warisan budaya tersebut diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

- Tari tidi lo tihu’o.



Tari tidi merupakan tarian khas Gorontalo dimana kata tidi sendiri berarti tari. Dari mulai busana, formasi tarian dan properti yang digunakan semuanya mengandung nilai moral sehingga tarian ini tidak boleh diubah ubah.

- Dana dana.



Dana dana adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Gorontalo. Tarian ini termasuk jenis tarian pergaulan masyarakat yang biasanya ditampilkan oleh penari pria maupun penari wanita. Selain itu, tarian ini juga merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya masyarakat setempat. Ini terlihat dari gerakan penari dan pengiringnya. Tari Dana Dana merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Gorontalo dan sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti penyambutan, perayaan hari besar, dan lain-lain.

Dengan ditetapkannya 8 WBTB tahun 2018, 7 WBTB di tahun 2019 dan 1 jenis WBTP di tahun 2020 serta 7 jenis WBTB di tahun 2021, maka total WBTB Gorontalo yang telah diakui dan ditetapkan pusat sebanyak 23 WBTB. Dengan ditetapkannya WBTB ini, maka tidak ada lagi pihak luar yang akan mengklaim warisan budaya Gorontalo tersebut. Untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat proses dan tahapan yang dilalui cukup panjang. Mulai dari proses kajian ilmiah, narasi pendukung, video dan dokumentasi serta sidang paparan oleh masing-masing daerah dengan menyertakan maestro serta tokoh

budaya lainnya untuk memperkuat usulan WBTB sebagai warisan budaya yang ada di Gorontalo. Penetapan pengakuan atas WBTB diberikan melalui sidang penetapan WBTB.

Selanjutnya, untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas iman dan taqwa, maka ditetapkan indikator rasio tempat ibadah persatuan penduduk. Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk adalah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pencapaian terhadap indikator ini khusus untuk pemeluk agama mayoritas yang ada di Provinsi Gorontalo yaitu Islam. Sehingga rasio yang dihasilkan ini adalah rasio terhadap jumlah pemeluk islam dengan jumlah masjid yang telah ada. Untuk mengetahui rasio tempat ibadah per satuan penduduk, digunakan rumus :

$$\text{Rasio Masjid} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Islam}}{\text{Jumlah Masjid}} \times \text{Satuan Penduduk Yang Ingin dicari}$$

Pada tahun 2021, Jumlah Penduduk pemeluk agama Islam di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 1.169.597 jiwa dan Jumlah Masjid adalah 2.669 masjid. Dengan data dan rumus tersebut, dapat dihitung rasionya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Masjid} = \frac{1.169.597}{2.669} \times 1$$

$$\text{Rasio Masjid} = 438 \times 1$$

$$\text{Rasio Masjid} = 1 : 438 \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa 1 Masjid digunakan oleh 438 penduduk muslim/yang beragama islam atau rasio sebesar 0,23, (*sumber data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo tahun 2022/diolah*).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung peningkatan terhadap capaian kinerja ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah tempat ibadah dengan pemberian bantuan dana hibah;
2. Meningkatkan jumlah bantuan dana hibah pembangunan tempat ibadah;

3. Mempercepat proses pencarian bantuan dana hibah pembangunan tempat ibadah;
4. Proses seleksi calon tempat ibadah penerima bantuan dana hibah agar tepat sasaran.

Pada tabel 3.2.36 dibawah ini akan digambarkan tentang jumlah pemeluk agama dan jumlah tempat ibadah di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.2.36
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

NO	AGAMA	JUMLAH PEMELUK	SARANA IBADAH	JUMLAH SARANA	RASIO
1	ISLAM	1.169.597	MASJID	2.669	0,23
2	PROTESTAN	16.477	GEREJA PROTESTAN	146	0,89
3	KATOLIK	1.936	GEREJA KATOLIK	26	1,35
4	HINDU	3.874	PURA	31	0,80
5	BUDHA	952	VIHARA	3	0,32

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

Selanjutnya, Pada tabel 3.2.37 dibawah ini akan digambarkan tentang jumlah pemeluk agama Islam dan jumlah mesjid di Provinsi Gorontalo pada kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.2.37
Jumlah Pemeluk Agama Islam dan Jumlah Mesjid di Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pemeluk Islam	Orang	1.131.626	1.136.626	1.141.752	1.170.793	1.169.597
2.	Jumlah Mesjid	Buah	2.247	2.272	2.580	2.476	2.669
3.	Rasio Mesjid/Satuan Penduduk		1:500	1:504	1:443	1:473	1:438
4.	Rasio		0,22	0,20	0,23	0,21	0,23

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2022



Tujuan 7 : Penurunan Angka Kemiskinan

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Penurunan Angka Kemiskinan yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Dimana untuk sasaran pertama yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Angka Kemiskinan, telah di analisis dan dijelaskan sebelumnya.

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis terhadap sasaran kedua dari tujuan Penurunan Angka Kemiskinan yaitu Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT
TERHADAP AIR MINUM, SANITASI YANG
LAYAK DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Pencapaian tujuan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak, Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak dan Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2.38
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	82,53 %	86,43 %	85,54%	81,00%	81,35%	100,43	83,02%	97,99

2	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	77,93 %	76,71 %	92,92%	67,71%	81,25%	119,99	69,41%	117,06
3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	80 %	24,77 %	18%	20%	22%	110,00	0 %	22,00

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pada tabel 3.2.38 diatas, digambarkan bahwa penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman, dapat dicapai dengan Sangat Baik. Dari target yang ditetapkan, ketiganya mencapai kinerja melebihi 100 persen dengan kode warna hijau tua.

Salah satu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan adalah terpenuhinya akses air minum dan tersedianya sanitasi yang layak. Untuk mendukung capaian kinerja ini, maka telah ditempuh dengan melaksanakan program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih pada rumahtangga miskin sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya.

Pencapaian cakupan layanan akses air minum dan sanitasi yang layak di tahun 2019 sangat maksimal dari target yang ada. Begitu pula capaian kinerja di tahun 2020 capaiannya sangat baik begitupun capaian di tahun 2021 ini. Pencapaian ini tidak lain karena kolaborasi pendanaan melalui alokasi anggaran APBN dan alokasi DAK Kabupaten/Kota. Selain itu juga koordinasi yang intensif dan sinergitas program antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja ini. Pencapaian kinerja air minum dan sanitasi layak tahun 2021 dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah digambarkan pada tanel 3.2.38 diatas, bahwa di tahun 2019 kinerja persentase cakupan akses air minum yang layak sebesar 86,43 persen dan persentase cakupan akses sanitasi layak sebesar 76,71 persen, dan di

tahun 2020 sebesar 85,43 persen untuk cakupan akses air minum yang layak dan 92,92 persen untuk cakupan akses sanitasi layak. Dan pada tahun 2021 terhadap kinerja cakupan akses air minum layak, dari target sebesar 81,00 persen, realisasi mencapai 81,35 persen atau capaian kinerja sebesar 100,43 persen. Sementara kinerja cakupan akses sanitasi layak, capaian sebesar 119,99 persen dari target kinerja sebesar 67,71 persen dengan realisasi sebesar 81,25 persen.

Maka di bawah ini akan digambarkan perbandingan capaian kinerja kedua indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Gambar 3.2.39
Kinerja Infrastruktur untuk Penanggulangan Kemiskinan



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tahun 2022

Terhadap kinerja tahun 2021, atas ke dua indikator kinerja ini, dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaiannya lebih rendah. Tetapi terhadap capaian atas target yang di tetapkan di tahun 2021 ini, capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan, sebagaimana digambarkan pada gambar 3.2.39 diatas.

Indikator selanjutnya yang di gambarkan pada tabel 3.2.38 diatas dapat diketahui bahwa luas kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo pada awal tahun

RPJMD yaitu tahun 2018 turun sebesar 80 persen sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Dengan kondisi 109 Ha target capaian penanganan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo sesuai dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, maka Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban untuk menuntaskan/menurunkan kawasan kumuh seluas 109 Ha tersebut atau dalam persentase sebesar 0 persen. Kawasan kumuh diakhir tahun RPJMD atau capaian 100 persen. Untuk pencapaian kinerja penurunan luas kawasan kumuh pada tahun 2018 adalah dari 100 persen kawasan kumuh menurun menjadi 80 persen luasan kawasan kumuh. Dan di tahun 2019, luas kawasan kumuh menurun menjadi 25,00 persen dan pada tahun 2020 dengan penurunan luas kawasan yang dapat ditangani sebesar 18 persen atau seluas 20 hektar. Capaian ini sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap penurunan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo sebesar 43 persen atau 47 hektar.

Pada tahun 2021, penurunan kawasan kumuh mencapai 22 persen dari target sebesar 20 persen. Setiap tahun capaian kinerja terhadap persentase penurunan luas kawasan kumuh tercapai sesuai dengan kewenangan provinsi. Capaian kinerja s.d tahun 2021 terhadap persentase penurunan luas kawasan kumuh telah menurun sebesar 65 persen, dimana proyeksi capaian kinerja sampai dengan akhir tahun RPJMD telah menurun 100 persen dengan target kinerja tahun 2022 (akhir tahun RPJMD) sebesar 35 persen atau 0 persen kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo dengan luas sasaran kawasan kumuh yang ditangani selama 5 tahun seluas 109 hektar.

Terhadap Penurunan Luas Kawasan Kumuh, telah ditempuh melalui Program Pemerintah yaitu Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi dan Program Peningkatan Kawasan Permukiman. Juga didukung oleh Kegiatan Pembangunan Peningkatan Prasarana/Sarana Kawasan Permukiman dengan target lokasi Desa Piloliyanga, Kabupaten Boalemo dan Desa Hungayonaan, Kabupaten Boalemo.

Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya preventif melalui pembinaan, sosialisasi dan advokasi sadar kumuh yang dilaksanakan diseluruh Kabupaten di Provinsi Gorontalo utamanya di desa-desa yang memiliki dampak lingkungan kumuh.

Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Provinsi Gorontalo masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Tentu saja bukan hanya di Provinsi Gorontalo yang memiliki masalah semacam ini. Banyak daerah-daerah lain yang juga berkutut dengan masalah kemiskinan, bahkan mungkin lebih parah dari Gorontalo. Penyebab kemiskinan begitu beragam dalam berbagai daerah. Bahkan masalah kemiskinan seperti ketersediaan kebutuhan pokok merupakan faktor yang sangat krusial yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mengetahui dan mempelajari lagi tentang pemasalahan kemiskinan ini. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah.

3.3. REALISASI ANGGARAN

3.3.1. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu pemerintah daerah disesuaikan dengan proporsi pembangunan. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki struktur APBD yaitu pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta belanja daerah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengalokasian anggaran ini untuk mendukung pencapaian kinerja IKU dan pencapaian kinerja pada indikator kinerja pendukung IKU.

Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2018 memiliki anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.1.822.869.959.330,57 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.779.537.903.506,45 atau sebesar 97,62 persen. Dan pada tahun 2019, tingkat pagu belanja tercatat mengalami kenaikan dengan nilai pagu belanja APBD Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 2 Triliun yaitu Rp. 2.020.131.920.539,50 naik sebesar 11 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan pagu anggaran belanja di tahun 2019 utamanya didorong oleh kenaikan pagu anggaran belanja operasi dan bagi hasil sebesar 16,4 persen dan 7,48 persen. Di sisi lain, terjadi penurunan pagu anggaran belanja modal yakni sebesar 7,35 persen yang didorong oleh penurunan belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 25,2 persen dan belanja bangunan gedung sebesar 18 persen. Sementara itu, realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 sebesar 1.938.384.421.061,72 atau sebesar 95,94 persen.

Peningkatan belanja operasi didorong oleh adanya peningkatan realisasi belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa masing-masing sebesar 7,4 persen dan 29,6 persen. Adapun jenis belanja pegawai yang dilakukan adalah kenaikan gaji tahunan PNS dan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh ASN serentak di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo bersamaan dengan pembayaran gaji pada Bulan Juli 2019.

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1.861.054.053.151,92 dengan realisasi penggunaan anggaran

sebesar Rp.1.732.528.592.447,17 atau sebesar 93,09 persen. Pada tahun 2021, anggaran sejumlah Rp.2.010.882.300.876,37 dengan realisasi sebesar Rp.1.866.359.526.688,85 atau 92,84 persen. Pada tabel dibawah ini akan disajikan alokasi anggaran persasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta realisasi penggunaan anggaran dan capaiannya di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Sasaran Strategis
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara (orang)	65	0,86	3.642.021.114	95,01
		Wisatawan Nusantara (kunjungan)	484.580	67,03		
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	10.665,33	77,21	21.672.680.682	94,54
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	Skor PPH Ketersediaan	76,66	115,10	1.114.666.031	98,92
		Skor PPH Konsumsi	75,50	89,45		
		Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	96,92	95,00	20.252.447.656	86,93
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	105,68	101,50	6.122.530.427	97,47
4	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0,43	20,78	4.360.485.603	90,24
		Luas Lahan Kritis yang ditangani	120,7 ha	12,07	8.566.138.044	99,40
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	373,42 km	145,01	54.514.908.567	77,78
		Indeks E-Government	2,51	65,53	6.377.375.822	95,54

6	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,01%	124,94	1.858.047.176	99,46
		Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	1,97	86,78	4.425.121.793	90,37
7	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	100,80	201.791.643.016	93,05
		Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,75%	100,15	106.542.441.049	93,41
		Angka Melek Huruf	99,89	99,91		
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,36	103,28	107.854.195.297	91,41
9	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	7 jenis	233,33	2.605.526.362	94,25
		Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,23	95,83	9.713.560.191	81,35
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	15,41%	97,61	87.010.143.328	95,02
11	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	81,35%	100,43	932.840.542	94,71
		Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	81,25%	119,99		
		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	22%	110,00	3.098.140.748	86,60
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B	50,00	17.401705.544	99,91

Sumber Data : Hasil perhitungan capaian kinerja dan hasil capaian realisasi anggaran per sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Dari tabel 3.3.1 diatas, dapat diketahui tingkat capaian kinerja disandingkan dengan tingkat capaian anggaran per sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021. Terhadap kinerja anggaran di Provinsi Gorontalo yang akselerasi terhadap penyerapannya Provinsi Gorontalo dikendalikan melalui aplikasi e-Monev dan pada tahun 2020 dan 2021 memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat melalui Tim Evaluasi Penyerapan

Realisasi Anggaran (TEPRA) dibawah Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Dalam rangka pengendalian percepatan penyerapan APBD dan APBN di Provinsi Gorontalo ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan secara rutin Pra-Rapim dan Rapat Pimpinan (setiap triwulan) serta Rapat Koordinasi dan Evaluasi (dilaksanakan per enam bulan) secara berkala yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan langsung dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan diintegrasikan dengan rapat percepatan pelaksanaan pembangunan baik terhadap paket pekerjaan yang dilelang maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan komitmen tersebut, dapat tergambar pula dalam prestasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah dimana selama enam tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dan 2018. Capaian tersebut adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan dimana di tahun 2014 dan 2016 dan 2018 menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya meraih WTP atas Laporan Keuangannya (100 persen) dan pada tahun 2019 dan 2020 Provinsi Gorontalo kembali memperoleh predikat WTP.

Pada tahun 2021, dimana terjadi pandemic covid-19 maka mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk menempuh kebijakan pengalokasian anggaran untuk penanganan covid-19. Guna menyikapi penanganan terhadap pandemi yang terjadi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan kebijakan *refocusing* anggaran utamanya pada anggaran untuk belanja langsung yang tersebar disemua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi Covid-19.

3.3.2. Analisis Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah mutlak untuk dilaksanakan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden bahwa pemerintah harus menjamin setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan serta harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya, akan diuraikan tentang tingkat efisiensi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Tingkat Efisiensi dan Capaian Kinerja terhadap Anggaran
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara (orang)	33,95	95,01	4,99	
			Wisatawan Nusantara (kunjungan)				
2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	77,21	94,54	5,46	
			Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	Skor PPH Ketersediaan	102,28	98,92	1,08
				Skor PPH Konsumsi			
				Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	95,00	86,93	13,07
Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	101,50	97,47	2,53				
3	Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	20,78	90,24	9,76	
			Luas Lahan Kritis yang ditangani	12,07	99,40	0,06	

4	Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	145,01	77,78	22,22
			Indeks E-Government	65,53	95,54	4,46
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Laju Inflasi	96,26	99,46	0,54
			Pertumbuhan Ekonomi			
			Indeks Gini			
			PDRB Perkapita			
			Tingkat Pengangguran Terbuka			
			Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)			
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	100,80	93,05	6,95
			Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	100,03	93,41	6,59
			Angka Melek Huruf			
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	103,28	91,41	8,59
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	233,33	94,25	5,75
			Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	95,83	81,35	18,65
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	97,61	95,02	4,98
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	110,21	94,71
		Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak				
		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		110,00	86,60	13,40
8	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	50,00	99,91	0,09

Sumber Data : Hasil perhitungan capaian kinerja dan hasil capaian realisasi anggaran per sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Pada tabel 3.3.2 diatas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja di tahun 2021. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai efisiensi anggaran terhadap kinerja beberapa sasaran strategis sangat baik, seperti pada sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang Berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 99,59 persen dengan realisasi anggaran sebesar 94,44 persen. Jika dibandingkan capaian kinerja terhadap anggaran, terdapat nilai efisiensi sumber daya sebesar 5,15 persen. Begitu pula yang terjadi terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan. Capaian kinerja rata-rata mencapai 100,42 persen. Sementara itu, capaian realisasi anggaran sebesar 93,23 persen. Dari kondisi kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 7,19 persen.

Kondisi demikian terjadi pula pada sasaran strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan indikator kinerja yang ditetapkan adalah Angka Kelahiran Total atau *Fertility Rate*. Capaian anggaran terhadap kinerja sasaran strategis ini terdapat efisiensi sebesar 11,84, hal ini terlihat bahwa realisasi kinerja lebih besar dibandingkan capaian realisasi anggaran dimana kinerja mencapai 103,28 persen dan capaian realisasi anggaran sebesar 91,41. Demikian juga terhadap sasaran Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Iman dan Taqwa (Imtaq) terdapat efisiensi sebesar 76,78 persen, dimana capaian kinerja sasaran strategis ini mencapai rata-rata 164,58 persen dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,80 persen. Yang terakhir, efisiensi sumber daya kinerja terhadap anggaran yang paling menonjol terlihat pada sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Permukiman yang mencapai kinerja rata-rata sebesar 110,11 persen, dengan capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 90,66 persen atau tingkat efisiensi pencapaian kinerja terhadap pencapaian realisasi anggaran sebesar 19,45.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap memerlukan dukungan serta kebijakan-kebijakan dan keberpihakan utamanya pada sektor pariwisata Gorontalo.



PENUTUP

- A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA DAERAH
- B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DIMASA DATANG UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya serta sebagai bagian dari kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga periode RPJMD 2017-2022.

Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo menggambarkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana telah dilakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja pemerintah dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi pemerintah daerah, laporan kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2021), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 atau pada tahun keempat periode RPJMD ini capaiannya masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Bagaimana tidak, di tahun 2021, merupakan tahun dimana seluruh roda perekonomian bahkan roda kehidupan nyaris lumpuh. Banyak kebijakan ditempuh oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

untuk penanganan dan pencegahan merebaknya penularan covid-19, yang paling utama adalah kebijakan *refocussing* anggaran dan realokasi kegiatan sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang berpihak pada penanggulangan covid-19 serta pada sector-sektor yang berpihak pada masyarakat yang terdampak covid-19. Meskipun demikian, secara umum pencapaian kinerja dari sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2021 mencapai 87,71 persen.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 8 (delapan) program unggulan atau program prioritas pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan yang dimulai tahun 2018, yaitu :

1. **Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global;
2. **Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo;
3. **Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo;
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan

professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman;

6. **Agama dan Budaya;** Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak;
7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaiki infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international;
8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa, kerja keras telah dibuat sebagai bahan analisis capaian Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD tahun 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk dan aspek.

Beberapa tantangan masih perlu menjadi fokus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Pemerintah Povinsi Gorontalo ke depan utamanya dalam pencapaian kinerja prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu pemulihan ekonomi masyarakat dimasa masih dalam situasi pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir serta komitmen pemerintah dalam melaksanakan target-terget pembangunan di tengah pandemi ini. Berikut ini akan diuraikan kesimpulan dari beberapa indikator kinerja yang

masih memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam pencapaiannya serta beberapa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap berprestasi meski di tengah pandemi, sebagai berikut:

Pertama, dalam mencapai tujuan menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai destinasi Nasional/Internasional. Tujuan ini akan dicapai dengan menetapkan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana terjadi pandemi covid-19, sektor pariwisata adalah yang paling banyak terdampak dari adanya pandemi ini. Pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas masyarakat utamanya di masa liburan atau dihari-hari libur, berdampak pada berkurangnya kunjungan pada destinasi-destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat hanya sebanyak 65 kunjungan saja. Dan kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 484.580 kunjungan. Kondisi ini memberikan torehan buruk terhadap kondisi pariwisata Provinsi Gorontalo sepanjang 2 tahun terakhir. Dan kondisi ini pula yang memacu pemerintah untuk segera bangkit dan bekerja lebih keras lagi dengan melakukan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di tengah pandemi covid-19 utamanya dalam melakukan promosi pariwisata.

Kedua, dalam mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan, dimana untuk sasaran strategis ini capaian kinerja sebesar 90,67 persen. Tantangan dalam pencapaian kinerja ini, yang merupakan kinerja utama yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen dari target kinerja sebesar 5,97 persen. Dibandingkan capaian tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami kontraksi hingga mencapai -0,02 persen. Sebagaimana diungkapkan diawal bahwa perekonomian baik pusat maupun daerah tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi

covid-19. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja makro sehingga banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi capaian kinerjanya yaitu antara lain kinerja ekspor luar negeri dalam hal ini adalah potensi ekspor komoditas jagung, perbaikan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, tingkat permintaan masyarakat, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan lapangan usaha. Di awal tahun 2021 telah dimulai program pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi sampai ke daerah.

2. Meningkatkan pendapatan daerah. Di Provinsi Gorontalo, penyumbang realisasi terbesar dikomponen PAD yakni pendapatan pajak daerah yang pada tahun 2021 sebesar 1,97 Triliun Rupiah. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 1,81 Triliun Rupiah, di tahun 2021 meningkat sebesar 0,16 Triliun Rupiah. Masih rendahnya sumber-sumber pendapatan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo merupakan salah satu faktor belum maksimalnya pencapaian target kinerja. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan pendapatan Daerah ini adalah dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah. Dengan program ini, diharapkan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pajak daerah, melainkan dari sumber-sumber pendapatan lain.

Ketiga, tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai kinerja tinggi mencapai 100,80 persen. Terhadap capaian kinerja IPM di tahun 2021, melebihi target kinerja yang ditetapkan. Nilai IPM di pengaruhi oleh 4 komponen yaitu :

1. Usia Harapan Hidup.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Rata-rata lama sekolah.
4. Pengeluaran per Kapita.

Keempat, tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang utama selanjutnya adalah Penurunan Angka Kemiskinan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 15,41 persen. Dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020, dimana angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai 15,59 persen. Kemiskinan di tahun 2021 ini turun sebesar 0,18 persen. Dari persentase jumlah penduduk tersebut, pada tahun 2021, penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 184,60 ribu orang menurun 0,71 ribu orang. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, program/kegiatan yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan serta koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders kesemuanya tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tanpa koordinasi dan sinergitas yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpihak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya menajapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa terjawab.

Kelima, tujuan memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan sasaran strategis terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana. Untuk mencapai kinerja ini ditetapkan indikator kinerja indeks resiko bencana dan luas lahan kritis yang direhabilitasi. Kedua indikator kinerja tersebut di tahun 2021, masih memerlukan kerja keras dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mitigasi bencana dan penanganan lahan kritis di Provinsi Gorontalo. Indeks resiko bencana/indeks ancaman Provinsi Gorontalo sebesar 0,43 dari target yang ditetapkan sebesar 0,37. Provinsi Gorontalo rentan terhadap ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Resiko bencana Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori "sedang". Sementara itu, terhadap penanganan/rehabilitasi terhadap lahan kritis di Provinsi Gorontalo, sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 5.126,7 hektar dari target akhir RPJMD sebesar 700.930 hektar. Kondisi ini menuntut peran seluruh stakeholders untuk berkinerja lebih keras lagi serta tentunya tak lepas juga dari dukungan anggaran yang dialokasikan.

Keenam, tujuan Peningkatan infrastruktur daerah untuk konektivitas ekonomi dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah. Upaya-upaya peningkatan kinerja bidang infrastruktur daerah yang terus dilakukan dan memerlukan upaya-upaya perbaikan yaitu meningkatkan indeks *E-Government* di Provinsi Gorontalo melalui dukungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Layanan Informasi, Assesment E-Government dan Pelatihan asesor SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB, indeks SPBE (indeks E-Government) Provinsi Gorontalo berada pada angka 2,51 dari target yang ditetapkan sebesar 3,83 atau capaian sebesar 65,53 persen. Capaian kinerja di tahun 2021 ini turun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020. Kondisi kinerja ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan salah satunya adalah dengan membangun Grand Design SPBE Provinsi Gorontalo sebagai pedoman atau penuntun arah dalam pelaksanaan SPBE di Provinsi Gorontalo.

Ketujuh, tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Gorontalo dengan menetapkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang capaian kerjanya masih kurang baik. Indeks reformasi birokrasi yang dilaporkan saat ini adalah nilai indeks hasil evaluasi tahun 2020 yaitu sebesar 63,39 atau kategori B. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2021 kategori BB. Dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tentulah banyak tantangan yang dihadapi. Butuh kerjasama semua pihak sehingga pengelolaan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Tantangan yang dihadapi tentunya terkait dengan partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap stakeholders, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta pencapaian visi strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan baiknya indeks reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo senantiasa melakukan perbaikan menuju cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Langkah perbaikan tersebut tentunya berpedoman atau merujuk pada rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam laporan

hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu pedoman untuk menentukan rencana aksi selanjutnya rekomendasi dan tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Penyederhanaan birokrasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pelantikan terhadap 282 pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan pada tanggal 31 Maret 2021.
2. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Masif sampai ketingkat Unit kerja/OPD. PMPRB Tahun 2021 di laksanakan oleh seluruh Unit kerja/OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Setiap OPD untuk menginternalisasi pelaksanaan RB di masing-masing OPD melalui pembuatan banner yang bertuliskan/mencantumkan 8 area perubahan RB dan Rencana Kerja RB Unit/OPD. Publikasi pesan-pesan reformasi birokrasi melalui website masing-masing OPD serta Pemberian Penghargaan SAKIP AWARD-Penghargaan Pemimpin Perubahan untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Mendorong dan memastikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi di Provinsi Gorontalo. Optimalisasi Pembinaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditempuh dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pembangunan zona integritas menuju WBK, dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai program kerja yang telah dituangkan dalam PKPT Inspektorat sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun calon unit kerja yang ditetapkan adalah : BPM-PTSP, BKPPD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan IPTB Samsat Kota Gorontalo, Samsat Kab.Gorontalo dan Samsat Kab.Boalemo. Dari 8 (delapan) unit kerja tersebut, 2 (dua) diantaranya yaitu Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi (Eks PTSP) Nilai Z dan Dinas Kesehatan Unit Pelayanan RSUD dr. Hasri Aiunun Habibie, telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon unit kerja

Berpredikat ZI Menuju WBK Kepada Kemenpan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mengajukan 2 Unit pelayanan tersebut.

4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga dapat lebih berperan dan memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan khususnya terkait kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik. Melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo saat ini level 3 menuju level 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Gratifikasi, WBS, dan SPIP. Penguatan Satgas UPG OPD untuk pengendalian gratifikasi. Penguatan Satgas SPIP OPD dan ketaatan terhadap pelaporan harta kekayaan LHKPN dan LHKASN. Peningkatan Indeks Integritas SPI Pemerintah Provinsi Gorontalo urutan ke-5 Nasional.
5. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Penyelarasan Indikator kinerja Utama yang berorientasi hasil dengan proses bisnis. keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level Provinsi sampai ke individu.
6. Melakukan penyempurnaan pada indikator kinerja utama, dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di bawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level Provinsi sampai ke individu pegawai. Penyelarasan Indikator kinerja Utama yang berorientasi hasil dengan proses bisnis. keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level Provinsi sampai ke individu pegawai
7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assesment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritis dan rencana suksesi jabatan. Mengintegrasikan kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui tindak lanjut Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilaksanakan pada Badan Diklat dan peningkatan pendidikan pada BKD. Menyusun dokumen pola karier sebagai dasar pengembangan karir ASN. Hasil

Assesment/ talentpool untuk pejabat administrasi telah digunakan sebagai salah satu dasar penilaian penempatan dalam jabatan structural.

8. Menyempurnakan Proses Bisnis Provinsi Gorontalo agar mengacu pada kinerja utama organisasi, sehingga bisa menjadi dasar pembentukan organisasi berbasis kinerja yang lebih tepat fungsi. penyusun Peta Proses Bisnis Provinsi Gorontalo dan pendampingan penyusunan peta Proses Bisnis seluruh OPD telah dilakukan di tahun 2021.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya nyata untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2017-2022. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya serta karunia sehat kepada para pemimpin dan seluruh masyarakat Gorontalo sehingga cita-cita dan harapan masyarakat di daerah tercinta ini bisa terwujud.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2022